Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat

SKRIPSI

Diajukankepada

Universitas Islam NegeriSunanAmpel Surabaya

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun Oleh:

Ramadhan Farid Akbar

NIM. B91215069

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bissmillahirrahmanirrahim...

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : RAMADHAN FARID AKBAR

NIM : B91215069

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Alamat : Desa Dukuhtengah Rt.05 Rw.03 Buduran Sidoarjo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1) Skripsi ini tidak dikumpulkan kepada pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
2) Skripsi ini benar-benar hasil karya saya secara mandiri bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
3) Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi yang terjadi.

Surabaya, 04 Juli 2019

METERAI TEMPEL
CBDDDAFF869209264
6000
ENAM RIBU RUPIAH

menyatakan,

n Farid Akbar
NIM. B91215069

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ramadhan Farid Akbar

NIM : B91215069

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya PERPPU No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang skripsi.

Surabaya, 03 Juli 2019

Dosen Pembimbing,

Drs. Masduqi Affandi, M.Pd.I

NIP. 195701211990031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh Ramadhan Farid Akbar ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 23 Juli 2019.

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,

Dr. H. Abd. Halim, M.Ag
NIP. 196307251991031003

Penguji I,

Drs. Masduqi Affandi, M. Pd.I
NIP. 195701211990031001

Penguji II,

H. Fahrur Razi, S.Ag, M.HI
NIP. 196906122006041018

Penguji III,

Dr. H. Abdullah Sattar, S.Ag, M.Fil.I
NIP. 196512171997030002

Penguji IV,

Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
NIP. 196912041997032007

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ramadhan Farid Akbar.
NIM : B 91215069
Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi dan Penyiaran Islam
E-mail address : faridramadhan 929@ gmail. com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis

(Ramadhan Farid Akbar)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Ramadhan Farid Akbar, NIM. B91215069, 2019 Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah adanya pergantian Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Jalaluddin Rachmat, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analisis), tetapi juga memandukan (sintesis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi. Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus, karena peneliti ingin melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh dalam menelaah tentang aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya pasca terbentuknya Perppu tentang organisasi kemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari jenis studi kasus untuk menentukan hasil penelitian bukan dari setelah data terkumpul dan menggunakan pengukuran, melainkan peneliti melakukan pengamatan dan analisis yang dimulai setelah menentukan judul penelitian sampai pencarian objek material (HTI Surabaya) sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Dan peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan ingin memberikan gambaran yang utuh, yaitu tentang bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Surabaya.

Penelitian dalam judul "*Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017*" yang dianalisis dengan kualitatif deskriptif menemukan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya masih sama.

Kata Kunci: Aktivitas Dakwah, Hizbut Tahrir Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 2 Tahun 2017, Organisasi Masyarakat.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **iii**
PERNYATAAN..... **iv**
MOTTO ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **vi**
ABSTRAK ..... **vii**
KATA PENGANTAR..... **viii**
DAFTAR ISI..... **x**

BAB I (PENDAHULUAN)

A. Latar Belakang **1**
B. Objek Kajian **5**
1. Kajian Material…….. 5
2. Kajian Formal……. 5
C. Rumusan Masalah……. **6**
D. Tujuan Penelitian **7**
E. Manfaat Penelitian **7**
F. Paradigma Fenomenologi **8**
G. Slandasan Teori **8**
H. Definisi Konsep…….. **9**
1. Profil Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)…… 9
2. Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). 13
I. Sistematika Pembahasan…….. **15**

BAB II PERLAWANAN HUKUM DAN AKTIVITAS DAKWAHHIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

A. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)…… **18**
1. Dasar Pembubaran 18
2. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan di NKRI…… 19
3. Kriteria Gerakan Organisasi yangTidak Dibenarkan…..... 20
B. Perlawanan Hukum **23**
1. Dasar Perlawanan Hukum 23
2. Argumen Hukum dalam Melakukan Pelawanan 25
3. Putusan Mahkamah Agung tentang Hizbut Tahrir Indonesia. 26
C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) **30**
1. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia……. 30
2. Tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)…… 37
3. Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)……... 45
4. Doktrin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)…….. 49
5. Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya…... 52

D. Respon Masyarakat..... 56
1. Respon Masyarakat Terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 56
2. Respon Masyarakat Terhadap Pembubaran(HTI)…… 56
E. Penelitian Terdahulu…… 57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 64
B. Kehadiran Peneliti..... 65
C. Sumber Data 65
D. Pengumpulan Data..... 66
1. Observasi…… 66
2. Dokumentasi……... 67
E. Analisis Data 51
1. Mereduksi Data……... 67
2. Triangulasi…… 68
F. Pengecekan Keabsahan Data 68
G. Tahapan Penelitian 71
H. Tahap Pekerjaan Lapangan…….. 73
I. Tekhnik Analisis Data…… 74
J. Tekhnik Analisis Sintesis……... 76
1. Analisis Deduksi…… 76
2. Analisis Induksi…… 76
3. Sintesis…… 77

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Masuknya (HTI) di Surabaya..... 78
B. Analisis Deduktif Induktif..... 78

BAB V (PENUTUP)

A. Kesimpulan 95
B. Saran..... 95
1. Aktivis Dakwah atau Praktisi……. 95
2. Akademisi……... 95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-qur'an turun sebagai petunjuk bagi ummat manusia[1] seperti aqidah,[2] tentang ritual atau cara ibadah kepada Allah mengenai shalat,[3] zakat,[4] puasa,[5] dan haji.[6] Demikian pula tentang pernikahan atau membangun rumah tangga,[7] pembagian waris,[8] silaturahim,[9] Mengenai kaharusan manusia berbuat adil dengan baik,[10] bahwa manusia dengan berbagai suku dan agama harus bersatu,[11] dan bilamana ada masalah hendaknya bermusyawarah.[12]

Pola hidup masyarakat Indonesia dapat dilihat dari berdirinya rumah ibadah seperti: adanya masjid, gereja, wihara, klenteng yang demikian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai keyakinan bertuhankan Yang Maha Esa. Kalau kita lihat dari baik pendidikan formal atau informal, dari orang tua dan sekolah, kepada anak dan murid menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia berusaha mewujudkan manusia yang adil dan beradab.

---

1. QS. An-Nisa'[04]: 82
2. QS. Yunus[10]: 03
3. QS. Al-Baqarah[02]: 238-239
4. QS. At-Taubah[09]: 103
5. QS. Al-Baqarah[02]: 185
6. QS. Ali Imran[03]: 97
7. QS. An-Nur[24]: 32
8. QS. An-Nisa'[04]: 11
9. QS. An-Nisa'[04]: 01
10. QS.Al-Maidah[05]: 08
11. QS. Ali Imran[03]: 103
12. QS. Ath Thalaaq[65]: 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada 17.504[13] pulau, dengan suku 1.340[14], dan beragam bahasa sebanyak 748[15], di Indonesia yang dipersatukan dengan bahasa yang menginduk pada bahasa Melayu menjadi satu bahasa yakni; Bahasa Indonesia.[16]Kalau melihat dari kegiatan masyarakat seperti khitan, kerja bakti, upacara pernikahan, peringatan hari besar nasional, peringatan hari besar Islam masyarakat lebih mengedepankan musyawarah.[17]*Euvoria*pemilihan presiden sering kita dengar ada tuntutan dari masyarakat agar dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan diberlakukan sama di depan hukum. Inilah sari dari pemahaman mengenai pancasila yang sudah menjadi darah daging masyarakat Indonesia.

Namun demikian ada pihak-puhak, golongan yang menolak bahkan menentang Pancasila, seperti yang pernah dilakukan oleh PKI pada tahun 1948 dengan sasaran para kyai dan tokoh masyarakat, termasuk Gubernur pertama Jawa Timur (Suryo) yang dimusiumkan di tempat penyiksaan di Ngawi, dan pada 1965 terjadi pemberontakan yang mengatasnamakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan menyiksa hingga membunuh tujuh Jendral yang dibuang di Lubang Buaya yang kemudian di jadikan Monumen Lubang Buaya.

Dikalangan ummat Islam, ada sekte yang menolak pancasila yakni Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir di Indonesia melakukan deklarasi pada tanggal

---

13. Wikipedia (2019) Daftar pulau di Indonesia menurut provinsi. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia_menurut_provinsi
14. Wikipedia (2019) Daftar suku bangsa di Indonesia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_bangsa_di_Indonesia
15. Wikipedia (2019) Daftar bahasa di Indonesia. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bahasa_di_Indonesia
16. Kridalaksana, Harimurti. (1991). *Masa Lampau Bahasa Indonesia: Sebuah Bunga Rampai.* Yogyakarta: Kanisius.
17. QS. Al-Baqarah[02]: 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2 Juni 2013 di Stadion Gelora Bung Karno.[18]Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an.[19] Namun menurut Moh Iqbal Ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.[20] Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah dan gerakan dakwah mana saja yang sempat dikunjungi oleh Amir pertama HT ini. Sulit sekali menelusuri sejarah perjalanan HTI di era dekade 1970-an, karena mereka sendiri belum ada menulis perihal kapan ide-ide HT masuk ke Indonesia, boleh dikatakan serba misteri.Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI.Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali. Seperti halnya Gerakan Tarbiyah, gerakan ini yang disebarkan melalui jaringan "dakwah kampus".[21] Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat-umat dari ide-ide yang tidak baik, sistem perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun

18. Wishnu. (2017). HTI; menyebar khilafah di bumi nusantara. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170814022839-20-234474/hizbut-tahrir-indonesia-menyebar-khilafah-di-bumi-nusantara
19. M. Imdadun Rahmat, (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia* (pp. 97). Jakarta: Erlangga.
20. Moh Iqbal Ahnaf, (2004). "MMI dan HTI: Image of The Others," dalam A.Maftuh Gabriel, *Negara Tuhan: The Thematic Ensiklopedia* (pp. 694). Jogjakarta: SR-Ins Publishing.
21. Yusuf Rahmad, (2006) *Islam and Society in Contemporary Indonesia* (pp. 34). Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan.[22]

Pada akhirnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada tanggal 9 Juli tahun 2017 resmi dibubarkan oleh pemerintah Indonesia, karena organisasi ini dianggap bertentangan dengan pancasila, sesuai dengan peraturan pemerintah undang-undang No 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Dirjen Kemenkumham, Freddy Harris mengklaim, Perpu tersebut membidik ormas nakal khususnya yang berseberangan dengan Ideologi dan Hukum Negara di Indonesia.Tapi di lapangan mereka mengingkari AD/ART sendiri, dan aktivitasnya mereka bertentangan dengan Pancasila.[23] Pergantian Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat dibentuk untuk merefisi UU 17/2013, sebagai langkah tegas pemerintah dalam mengantisipasi ancaman dari organisasi kemasyarakatan bagi keutuhan NKRI. Khilafah dianggap sebagai ancaman bagi bangsa Indonesia, Khilafah ini merupakan *trade mark* (identitas produk) dari organisasi HTI. Dari pusat sampai daerah, aktivis HTI punya satu suara bagaimana mengkampanyekan Khilafah.[24]

Motif Hizbut Tahrir Indonesia mendirikan Negara Khilafah.Hal ini dilatari untuk memenuhi salah satu ayat Al-Qur'an yang biasa dijadikan dalil adalah QS. Al-Ma'idah ayat 48-49, ayat populer lainnya adalah QS.

---

22. Ryan, (2004). *Mengenal Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis*. Khilafah Press, cet. Jumadil Awal 1434 H / Maret 2013.(pp. 1)
23. Indonesia resmi bubarkan hizbut tahrir (19 Juli 2017). VOA Indonesia. Diakses dari https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-bubaran-hizbut-tahrir-indonesia/3950336.html
24. Arifan, A. (2014). *Jurnal Studi Sosial*: Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia., 6, (pp. 54)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Ma'idah ayat 44, terkait justifikasi kafir terhadap mereka yang tidak mengimplementasikan hukum Tuhan:[25]

Untuk mewujudkan negara khilafah, Hizbut Tahrir Indonesia melakukan dakwahnya melalui metode yang ditempuh dalam mengemban dakwah (telah ditetapkan) berupa hukum-hukum syara yang diambil dari thariqah perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Kondisi kaum muslim saat ini hidup di darul kufur karena mereka menerapkan sistem hukum selain dari apa yang diturunkan Allah SWT, serupa dengan (keadaan) negeri Makkah pada saat diutusnya Rasulullah SAW. Untuk itu, fase Makkah wajib dijadikan acuan dalam mengemban dakwah dan dijadikan sebagai obyek untuk diteladani.[26]

Berdasarkan hal-hal inilah Hizbut Tahrir menetapkan langkah operasionalnya dalam tiga tahap:[27]

1. Tahap tatsqif (pembinaan dan pengkaderan), untuk melahirkanorang-orang yang meyakini fikrah Hizbut Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.

2. Tahap tafa'ul (berinteraksi) dengan umat, agar mampu mengembandakwah Islam, sehingga umat akan menjadikannya sebagai perkara utama dalam kehidupannya, serta berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan.

25. Arifan, A. (2014). *Jurnal Studi Sosial*: Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia., 6, (pp. 94-95)
26. *Strategi rekrutmen kader HTI kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.* Diakses dari, http://digilib.uinsby.ac.id
27. Hizbut Tahrir, *Mengenal*. terj. Abu Afif dan Nur Khalish. (pp. 40).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahap istilamu al-hukmi (penerimaan kekuasaan), untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh, sekaligus menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia.

Jika dilihat dari pemaparan di atas dan juga berdasarkan hasil penggalian data, aktivitas dakwah Hizbut tahrir Indonesia di Surabaya masihlah sama. Baik sebelum dibubarkan maupun sesudah dibubarkan oleh pemerintah, yang mana pola dakwahnya dalam tahap tafa'ul (berinteraksi) ini bisa dilihat dengan konsistennya buletin dakwah yang menjelaskan tentang khilafah. Hizbut Tahrir Indonesia sebelum dicabut badan hukumnya memiliki buletin dakwah bernama Al-Islam dan setelah dibubarkan berubah menjadi buletin dakwah Kaffah. Tidak hanya itu, Hizbut Tahrir juga merambah media online sebagai sarana berdakwah mereka, yakni Media Umat.

B. Objek Kajian

1. Kajian Material

Pembahasan kajian material ini peneliti memaparkan bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca pembubaran, berdasarkan data yang didapatkan peneliti dilapangan menunjukkan aktivitas dakwahnya tidak berubah. Artinya dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih tetap menggunakan media cetak, online dan kajian keilmuan dan menyerukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan metode *Laa Madiyah* (tanpa kekerasan) dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manhaj (metode) kenabian seperti yang dicontohkan Rasulullah, menegakkan Khilafah. Kegiatan dakwah Hizbut TahrirIndonesia (HTI)masih samaseperti lembaga dakwah yang lain, dengan bentuk kajian, seminar, karena dengan tujuan edukasi kepada umat.[28]

2. Kajian Formal

Sedangkan di kajian formal sendiri, peneliti akan memaparkan sikap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca pembubaran. Dari hasil observasi yang dilakukan melalui media online, peneliti menemukan bahwasanya anggota Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terima dengan pembubaran atau pencabutan badan hukum yang dilakukan pemerintah.Sikap ini terbukti dengan adanya pelawanan hukum yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).Karena mendapatkan hasil yang tidak sesuai harapan atau mendapatkan penolakan, aktivis HTI mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017.[29]

28. Hasil wawancara peneliti terhadap Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya.

29. Nurhadi. (2018). Agenda Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 211/G/2017/PTUN-JKT. Diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/?p=7029

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari paparan singkat latar belakang di atas, peneliti mempersempitdengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pasca Terbentuknya Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat peneliti ketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui Bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) setelah adanya Pergantian Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 mengenai Organisasi Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaan dari penelitian ini, peneliti menganggap ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan, seperti:

1. Secara Teoritis
   a. Dari Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru dan manifestasi terhadap pengembangan Ilmu pengetahuan di bidang Dakwah khususnya pada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian keilmuan Dakwah dan menjadikan referensi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, khususnya pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

c. Diharapkan dapat menjadi literatur baru bagi para daiguna menambah wawasan yang berkaitan dengan keilmuan dakwah.

2. Secara Praksis

a. Bagi Peneliti

Dengan penilitian ini, besar harapan peneliti untuk dapat mengetahui dan memahami aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya pasca dibubarkan pemerintah. Selain itu penelitian ini bisa menjadi bahan acuan pembelajaran bagi penulis agar dapat mengamalkannya. Serta dalam rangka memenuhi tugas Akhir semester.

b. Secara Akademis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan tema ini bisa dijadikan sebagai bahan atau kajian bagi penelitian-penelitian berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Konseptual

Definsi konsep disini berfungsi untuk memberikan batasan-batasan secara jelas yang berhubungan dengan konsep-konsep yang hendak diteliti agar tidak menimbulkan interpretasi ganda dari variabel yang diteliti.Sehingga peneliti membagi pada dua bagian objek yakni objek formal dan objek material. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah:

1. Aktivitas Dakwah

Aktivitas dakwah adalah segala sesuatu yang berbentuk aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dengan sadar yang mengajak manusia ke jalan yang mulia di sisi Allah SWT. Serta meluruskan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam.[30]

Aktivitas dakwah juga bisa diartikan sebagai bentuk kegiatan yang mengarah kepada perubahan terhadap sesuatu yang belum baik agar menjadi baik dan kepada sesuatu yang sudah baik agar menjadi lebih baik lagi.[31]

Dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali aktifitas, kegiatan atau kesibukan yang dilakukan manusia. Namun, berarti atau setidaknya kegiatan tersebut bergantung pada individu tersebut. Karena menurut Samuel Soeitoe, sebenarnya aktifitas bukan hanya sekedar kegiatan,

30. Ahmad, S. (2010). *Aktivitas dakwah KH. Muhyiddin Na'im melalui masjid Al-Akkhyar Kemang Jakarta Selatan*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.
31. Ibid. (pp.13).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi aktifitas dipandang sebagai usaha untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan orang yang melakukan aktifitas itu sendiri.[32]

Definisi di atas menimbulkan beberapa prinsip yang menjadikan substansi aktifitas dakwah sebagai berikut:

1. Dakwah merupakan suatu proses aktifitas yang penyelenggaranya dilakukan dengan sadar atau sengaja.
2. Usaha yang diselenggarakan itu berupa mengajak seseorang untuk beramal *ma'ruf nahi munkar*untuk memeluk agama Islam.
3. Proses penyelenggaraan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yaitu untuk mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah SWT.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. Perppu ditandatangani oleh Presiden. Setelah dirumuskan menjadi undang-undang, Perppu diajukan ke DPR dalam persidangan yang berbentuk pengajuan RUU

32. Samuel, S. (1982). *Psikologi Pendidikan II*. Jakarta: FEUI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang. Pembahasan RUU tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perppu. Jika Perppu ditolak DPR, maka Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.[33] Pada hakekatnya, substansi dari Perppu juga harus berlandaskan terhadap pancasila sebagai norma dasar yang berlaku di Indonesia, yakni UUD 1945 Amandemen ke-4.

Perppu juga harus bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada dasarnya sama dengan undang-undang pada umumnya, akan tetapi karena adanya kegentingan yang memaksa, maka ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebut bahwa "*Dalam hal ihwal (berbagai hal) kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang"*. Jika mengacu pada rumusan ini maka jelaslah bahwa sejatinya Perppu merupakan peraturan pemerintah yang berfungsi sebagai undang-undang. Dengan demikian Perppu merupakan salah satu instrument hukum yang dapat diterapkan oleh Presiden tanpa memerlukan keterlibatan Dewan

33. Wikipedia (2019) Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwakilan Rakyat (DPR). Pembentukan Perppu yang dilakukan oleh Pemerintah bukan berarti tanpa andilnya Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali, peran DPR terlihat dalam pasal 22 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-4 yang berbunyi, "*Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan berikut*" dan "*jika tidak mendapatkan persetujuan maka peraturan pemerntah itu harus dicabut*." Peranan DPR ini mencirikan bentuk prinsip *cheks and balances* yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[34]

Berbeda dengan undang-undang, masa berlakunya Perppu sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan Perppu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perppu tersebut. Pengajuan Perppu ke DPR dilakukan dalam bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan Perppu menjadi undang-undang. Apabila DPR menyetujui Perppu maka rancangan undang-undang tersebut menjadi penetapan terhadap Perppu tersebut menjadi undang-undang yang sah. Sedangkan jika Perppu itu ditolak oleh DPR maka Perppu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undang-undang tentang pencabutan

34. Imam Syafi'I, (2018). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Dalam Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perppu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut.[35]

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.Bagian awal mencakup halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Adapun bagian utama meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, definisi konseptual, sumber data, penelitian terdahulu, konseptualisasi, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, jadual penelitian. Sedangkan bagian akhir dari pendahuluan ini adalah sistematika penulisan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, memuat dua objek penelitian yaitu objek formal mengenai Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Keputusan

35. Ibid. (pp. 41).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi. Sedangkan objek materialnya Hizbut Tahrir Idonesia di Surabaya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini ditulis metode apa yang digunakan untuk melaksanakan penelitian tentang Aktivitas Dakwah Hibut Tahrir Indonesia di Surabaya.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini menguraikan data yang diteliti mengenai analisis data terhadap hasil penggalian data yang dilakukan oleh peneliti terhadap keadaan yang sebenarnya dilapangan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya yang diperoleh dari analisis bab empat kemudian dirangkai dengan penutup, penutup berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PERLAWANAN HUKUM DAN AKTIVITAS DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI)

A. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1. Dasar Pembubaran

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Freddy Harris, mengumumkan pencabutan badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu, 19 Juli 2017. Freddy menyebutkan ada 5 poin alasan terkait dengan pembubaran HTI dalam jumpa pers:

a. Pembubaran itu berdasarkan Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU tentang Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017.

b. Ormas HTI tercatat berbadan hukum No AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014.

c. Pada 8 Mei 2017 pemerintah mengkaji keberadaan HTI dan memutuskan perlu mengambil langkah hukum terkait ormas yang mengusung pemerintahan berdasarkan khilafah itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Perlunya merawat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan keutuhan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berdasarkan UUD 1945.

Dengan mengacu kepada Perppu Ormas, status badan hukum HTI dicabut melalui Surat Kementerian Hukum dan HAM No AHU -30.AHA.01.08.2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI no AHU 00282.60.10.2014.2014 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.. Surat keputusan pencabutan Badan Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dikeluarkan berdasarkan data, fakta, dan koordinasi dari seluruh instansi yang dibahas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.[36]

2. Kriteria Organisasi Kemasyarakatan di NKRI

Organisasi kemasyarakatan di Indonesia telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dalam hal ini ormas menjadi salah satu bentuk kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagai hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[37] Untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik

36. Pertemuan Jokowi dan Prabowo yakin bisa rukunkan simpatisan (22 Juli 2019). *Tempo*. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1227231/pertemuan-jokowi-dan-prabowo-diyakini-bakal-rukunkan-simpatisan/full&view=ok
37. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (NKRI) maka diaturlah persyaratan dalam pembentukan ormas dalam Bab II yang membahas tentang Asas, Ciri dan Sifat organisasi:

BAB II

ASAS, CIRI DAN SIFAT

Pasal 2

Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Ormas dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis

3. Kriteria Gerakan Organisasi yang Tidak Dibenarkan di NKRI

Pemerintah dalam undang-undangnya juga memberikan penjelasan tentang organisasi yang dilarang, termaktup dalam Perppu Bab XVI:

BAB XVI

LARANGAN

Pasal 59

Ormas Dilarang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;

b. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

c. Menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;

d. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;

e. Menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

Ormas Dilarang:

a. Melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;

b. Melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. Melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman danketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau

e. Melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegakhukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ormas dilarang:

a. Menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b. Mengumpulkan dana untuk partai politik.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen AHU Kemenhukam), Freddy Harris, menjelaskan bahwa Kemenhumkam memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Yang artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan atau ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum. Dan apabila ada perkumpulan atau ormas yang tidak memenuuhi syarat administrasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka pihak Kemenhumkam tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum kepada perkumpulan tersebut.

Sedangkan mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan atau ormas Hzibut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, pencabutan SK telah dilaksanakan pada Rabu, 19 Juli 2017 oleh pemerintah untuk menindak tegas kepada perkumpulan atau ormas yang melakukan upaya atau aktivitas yang tidak sesuai dengan kehidupan ideologi pancasila dan hukum NKRI. Meskipun dalam AD/ART Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan kegiatan dan aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) banyak yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebelumnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan Nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014.Pengajuan permohonan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dilakukan secara elektronik atau melalui website ahu.go.id-red.[38]

B. Perlawanan Hukum

1. Dasar Perlawanan Hukum

38. Wikipedia (2019) Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia. Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlawanan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam mempertahankan badan hukum yang dicabut oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhukham), menjadi sorotan yang apik.Sebab rencana pembubaran kini sudah menjadi realisasi dengan pengeluaran Surat Keputusan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian Dalam Negeri Nomor 44/D.III.2/VI/2006. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang melandasi ideologinya dengan agama dan yang membedakan dari ormas lain yakni *ghiroh* dalam menegakkan negara khilafah di Indonesia, dengan resmi dibubarkan pada hari Rabu, 19 Juli 2017.

Dengan ini, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak terima dengan putusan pemerintah tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak selesai disitu perjuangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk mempertahankan badan hukum yang sudah didapatkannya pada tahun 2014 silam. 10 fraksi dari DPR menjadi sasaran selanjutnya, dengan melobi untuk menolak Perppu Ormas.Namun sayang, upaya itu kandas, dengan demikian Makamah Konstitusi pun juga menolak gugatan yang dilayangkan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Lagi-lagi aktivis HTI mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) di laman PTUN Jakarta, gugatan HTI bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017.[39] Tapi gugatan itu mendapat respon yang sama,

39. Nurhadi. (2018). Agenda Sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor : 211/G/2017/PTUN-JKT. Diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/?p=7029

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berujung pada penolakan dari Majelis Hakim. Setelah itu gugatan dilayangkan lagi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara (PTTUN).

2. Argumen Hukum dalam Melakukan Perlawanan

Dalam perlawanan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mempertahankan badan hukum yang telah dicabut, ada tiga poin yang diadvokasi oleh pihaknya yang tidak lain juga sebagai langkah mempertahankan argumen bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sah berdiri, tidak melanggar dan tidak ada dasar pembubaran yang menjelaskan kesalahan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ditampakkan oleh pemerintah.[40]

a. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ajukan Uji Materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi (MK)[41]

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) resmi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kmeasyarakatan melalui kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra. PadaSelasa, 18 Juli 2017. Namun usaha itu

40. Abi, S. (2018). Perlawanan pembubaran dan pedang bermata dua vonis HTI. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180507084204-12-296173/perlawanan-pembubaran-dan-pedang-bermata-dua-vonis-hti?
41. Fadel, P. (2018). 3 Perlawanan HTI Tolak Pembubaran Ormas, dari Uji Materi hingga Banding. Diakses dari https://news.okezone.com/read/2018/05/08/337/1895667/3-perlawanan-hti-tolak-pembubaran-ormas-dari-uji-materi-hingga-banding

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ternyata sia-sia lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) menolah gugatan tersebut pada Selasa, 12 Desember 2017.

b. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ajukan Gugatan ke PTUN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kemudia menggugat pembubarannya ke PTUN Merujuk dari sistem informasi penelusuran perkara (SIP) di laman PTUN Jakarta, gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bernomor 211/G/201/PTUN.JKT dan tertanggal 13 Oktober 2017. Dalam gugatannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) meminta SK Nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan ditunda pelaksanaannya hingga ada kekuatan hukum yang mengikat.Namun, PTUN menolak seluruh gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) soal pembubaran tersebut pada Senin, 07 Mei 2018.

c. Hizbut Tahri Indonesia (HTI) Berencana Layangkan Banding

Menyikapi hasil persidangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang menolak gugatan terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-30.A.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

00282.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

3. Putusan Mahkamah Agung (MA) tentang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Pada dasarnya pembubaran HTI bukan tanpa alasan, mulanya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Wiranto memaparkan adanya tiga alasan pemerintah, Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di Masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Upaya pembubaran yang dilakukan pemerintah, tidak serta merta.Karena pada acuan UU Ormas harus melalui persetujuan pengadilan terlebih dahulu.Maka dari itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam rumusan yang baru ini ada salah satu norma yang di rubah menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembubaran ormas tidak harus melalui jalur pengadilan. Dengan demikian pencabutan status badan hukum berdasar pada Surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor Ahu-30.AH.01.08 tahun- 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.[42]

Dengan adanya penolakan kasasi dari Mahkamah Agung (MA) yang dipimpin Sudaryono, Hary Djatmiko dan Supandi dalam sidang putusan pada 14 Februari 2019 menegaskan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia menemui jalan terkahir, yakni harus dicabut badan hukumnya. Majelis Hakim PTUN Jakarta menilai, ormas HTI terbukti ingin mendirikan negara khilafah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.HTI ingin mendirikan negara Khilafah Islamiyah di NKRI tanpa ikut pemilu dan hal tersebut sudah dalam bentuk aksi dan bukan hanya konsep atau pemikiran.Bukti ini dijadikan salah satu pertimbangan majelis hakim untuk menolak gugatan yang diajukan HTI terkait pembubaran ormas.[43]

Aksi dan pemikiran itu sudah tidak dalam konsep nasionalisme.Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai, HTI telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Ormas. Sesuai UU itu, Menteri Hukum dan HAM pun berhak mencabut status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun

42. Cabut SK badan hukum, pemerintah resmi bubarkan HTI. (19 Juli 2017). *BBC News*. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40651986
43. Angger, P. (2019) MA tolak kasasi HTI. Diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/02/15/19140371/ma-tolak-kasasi-hti?page=all

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2017. Selain itu, Majelis hakim menilai HTI sudah salah sejak awal kelahirannya sebagai organisasi massa. Harusnya, menurut Hakim, HTI mendaftarkan diri sebagai partai politik karena mempunyai tujuan politik. Berdasarkan keterangan saksi dan ahli serta bukti yang dihadirkan di persidangan, HTI sama dengan Hizbut Tahrir yang ada di seluruh dunia. Mereka sama-sama memperjuangkan dan menegakkan Khilafah Islamiyah yang bersifat global. Meski demikian, berbeda dengan di negara lain, HTI tidak didaftarkan menjadi partai politik, tapi perkumpulan berbadan hukum.

Majelis hakim menilai, surat keputusan Kemenkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur. Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.[44]Atas dasar putusan ini berarti pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah mendapat kekuatan hukum tetap (ikrah).

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya mengenai "Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia" ini juga pernah dilakukan oleh:

1. NYS Junita Arliani penelitiannya berjudul "Strategi Politik Hizbut Tahrir Dalam Menginternasionalisasikan Gagasan Penegakan Kembali Khilafah Islamiyah (Menggunakan Pendekatan Konstruktivisme)." Penelitian ini diajukan sebagai bukti program akhir Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

   Dalam penelitian tersebut dijelaskan dua strategi khusus yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir untuk mewujudkan misinya, yaitu:

   a. Karena berkat perjuangan Syaikh Taqiyuddin Islam, perkembangan Hizbut telah menjalar hampir ke 50 negara dan tersebar ke seluruh dunia (mulai dari Timur Tengah, Eropa, Asia, Afrika, Amerika bahkan Australia), sejak didirikan pada 1953 di Yordania. Dengan meningkatkan

44. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kapasitas Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam dan aktor hubungan Internasional Hizbut Tahrir sebuah institusi dapat diamati kualitas dan kuantitasnya debgan bedasar pada nilai dan keanggotaan.

b. Meningkatkan relevansi gagasan Khilafah Islamiyah pada skala Internasional. Pemikiran Hizbut Tahrir bisa terbilang unik dengan dilihat dari sisi logika berpikir Hizbut Tahrir dalam menganalisa kondisi masyarakat dan pendekatan yang sangat halus.

2. Noeng Muhadjir, penelitian dengan judul "Model Dakwah Hizbut Tahrir" memiliki sisi orientasi gerakan organisasi Islam di Indonesia yang beragam, dengan sisi ideologis pencetus atau pendiri dari organisasi tersebutdalam memahami ajaran Islam, sehingga dapat dipetakan langkah geraknya menjadi tiga, yakni:

a. Orientasi murni dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar, artinya gerakan ini hanya mengacu terhadap dakwah saja. Orientasi ini membangun masyarakan ke arah yang lebih baik dengan melalui perbaikan, perubahan, dan melakukan transformasi sesuai dengan keadaan masyarakat. Organisasi yang bergerak dengan orientasi pada dakwah tidak memiliki kesamaan dalam strategi dan metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdakwah. Ada yang menggunakan kekerasan, ada yang melalui rumah ke rumah, adapun yang menggunakan kebijakan.

b. Orientasi murni politik, artinya gerakan ini menggunakan politik struktural sebagai alur geraknya, tentunya pola seperti ini tidak lepas dengan partai politik yang bercirikan Islam dan gerakan politik non-parlemen. Pandangan organisasi yang menggunakan politik yang bercirikan Islam menganggap bahwasanya gerakan Islam bisa ditegakkan apabila telah berkuasa dalam suatu negara, sehingga sektor politik, ekonomi, budaya bahkan pendidikan dan keamanan dapat kuasai juga.

3. Rakhmat Nur Hakim, Penelitian dengan judul "Studi Deskriptif: Gerakan Islam Politik Fundamentalis Kasusu Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya". Penelitian ini di ajukan sebagai program akhir Sarjana Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Tahun 2014. Pada penelitian ini yang menarik adalah tempat penelitiannya di Surabaya dan menggaet sekolah bahkan kampus Negeri Islam di Surabaya. Dengan Narasumber Ketua DPH HTI Surabaya, Aktivis HTI Surabya, Ketua DPW HTI Surabaya, serta mantan aktivis HTI Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syaiful Arif, penelitian dengan judul "Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila" ini diajukan sebagai bahan penelitian dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. II, NO. 1, 2016 STAINU Jakarta. Pandangan HTI atas Pancasila menarik dan mengandung kontradiksi, disatu sisi Pancasila menjadi ideologi bangsa namun menjadi ideologi kufur. Dikutip dari selebaran HTI yang berjudul *Al-Banshasila Falsafah Kufr laa Tattafiq ma'a al-Islam* yang digambarkan Ainur Rofiq dengan dua landasan sebagai argumen.

   a. Pancasila mengakomodir kebebasan beragama, tercantum pada sila Persatuan Indonesia yang menjaga dan menghormati kemajemukan bangsa, salah satunya kemajemukan agama. Penghargaan atas kemajemukan agama ini bertentangan dengan prinsip HTI yang menekankan kebenaran tunggal agama Islam. Argumen kedua, karena Pancasila berisi kemajemukan ideologi (mabda') dengan mengakomodir ideologi-ideologi non-Islam, seperti sosialisme, demokrasi dan nasionalisme. Padahal menurut HTI, mabda' yang paling benar adalah mabda' Islam. Dengan argumentasi ini, maka Pancasila adalah falsafah kufur yang bertentangan dengan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pancasila bukanlah ideologi kufur, melainkan seperangkat falsafah (*set of philosophy*). Seperangkat falsafah ini baik di dalam dirinya sendiri karena memuat gagasan filosofis berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Dengan demikian tidak ada yang bermasalah di dalam rumusan Pancasila, karena ia memang merupakan rangkaian gagasan filosofis yang baik.

5. Fadh Ahmad Arifan, penelitian dengan judul "Paham Keagamaan Hizbut Tahrir Indonesia" pada jurnal Jurnal Studi Sosial, Th. 6, No. 2, Nopember 2014, 94-102. Paham keagamaan Hizbut Tahrir dilandaskan pada lima dasar hukum Islam.

a. Khilafah menjadi *trade mark* nilai dagang yang disajikan dalam rangka menegakkan kembali Khilafah Islamiyah dengan cara kegiatan politis yang apapun bentuknya dianggap sebagai dakwah siyasi.

b. Pandangan tentang jihad dimaknai dengan syar'i, yaitu perang untuk menyebarkan risalah Islam. jihad ini dilakukan dengan melihat kondisi yang mengancam umat muslimin. Adapun kondisi yang dirasa genting dan harus melakukan jihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila ada kaum muslimin diserang atau negeri mereka diserang oleh orang-orang atau negara kafir.

2) Apabila ada sekelompok komunitas Muslimin yang diperangi oleh orang-orang atau negara kafir. 3. manakala dakwah Islam yang dilakukan oleh Daulah Islam (Khilafah) dihadang oleh penguasa kafir dengan kekuatan fisik mereka.

c. Formulasi nalar fiqih ini menggunakan peranan akal dan wahyu dalam berjihat. Akal bagi mereka digunakan sebagai alat memahami wahyu dan memahami fakta. Sedangkan metode ijtihadnya 1. Mengetahui fakta atas persoalan yang akan digali hukumnya, 2. Mengetahui nash-nash syara tentang suatu masalah tersebut, 3. Mengerahkan segenap kemampuan dalam menggali hukum syara tentang suatu masalah dari nashnash yang berkaitan dengannya hingga dia (seorang mujtahid) merasakan tidak mampu lagi melampaui upaya yang telah ditempuhnya

d. Fiqih Ibadah, dalam perkara yang sangat luas, para aktivis HTI menggunakan kitab-kitab dari berbagai mazhab untuk selanjutnya dicari mana dalil terkuatnya (tarjih). Hanya saja HTI tidak seperti bathsul masa'il NU yang tidak akan menggunakan kitab-kitab karya ulama tertentu seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Taymiyah, Yusuf Qaradhawi, Said hawwa, Nashirudin al-banni, dan Syaikh bin Baz.

6. Sudarno Shobron, dengan judul penelitian "Model Dakwah Hizbut Tharir Indonesia"dalam Jurnal PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2014: 44 – 62 Universitas Muhammadiyah Surakarta. HTI menggunakan tiga orientasi gerakan, 1. Orientasi murni dakwah amar makruf nahi munkar. Artinya, gerakan ini hanya berorientasi dakwah saja, tidak tertarik ke politik praktis. 2. Orientasi murni politik. Artinya gerakan ini mengambil jalur politik struktural, melalui politik kekuasaan, dengan mendirikan partai politik yang bercirikhas Islam, dan gerakan politik non-parlemen. 3. Memiliki orientasi dakwah dan politik. Inilah yang disebut dua sayap, yakni sayap dakwah dan sayap politik. Ini dapat dimaknai bahwa dakwah untuk kepentingan politik, dan politik dijadikan payung untuk berdakwah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah sistematis dan logis pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.[45] Metode penelitian berarti prosedur pencarian data; penentuan populasi, sampling, penjelasan konsep, cara pengumpulan data dari hasil observasi atau pengamatan peneliti, penyebaran angket, wawancara dan studi dokumentasi.[46]

Sementara dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Jalaluddin Rachmat, penelitian deskriptif bukan saja menjabarkan (analisis), tetapi juga memandukan (sintesis). Bukan saja melakukan klasifikasi, tetapi juga organisasi.Sedangkan jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah studi kasus, karena peneliti ingin melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh dalam menelaah tentang Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia di Surabaya pasca keluarnya Perppu tentang organisasi kemasyarakatan.

Oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari jenis studi kasus untuk menentukan hasil penelitian bukan dari setelah data terkumpul dan menggunakan pengukuran, melainkan peneliti melakukan pengamatan dan analisis yang dimulai setelah menentukan judul

45.Wardi Bahtiar, !((&). *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos. (pp. 1).
46. Ibid, (pp.59).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian sampai pencarian objek material (Eks HTI Surabaya) sebagai sumber primer dalam penelitian ini. Dan peneliti ingin mengetahui secara mendalam dan ingin memberikan gambaran yang utuh, yaitu tentang bagaimana aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di Surabaya pasca dibubarkan pemerintah.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai pengamat penuh, sehingga kehadiran peneliti tidak diketahui oleh subjek, namun pada narasumber atau informan yang lain diketahui sebagai peneliti dengan nama samaran Farida untuk mempermudah mendapat informasi. Sebab berdasarkan pengalaman sebelumnya peneliti kesulitan apabila informan lawan jenis.

Peneliti juga menggunakan narahubung untuk memperoleh data terhadap anggota Hizbut Tahrir Indonesia Surabaya yang kebetulan berada di Kota Padang.Untuk mengakses informasi, peneliti yang dibantu narahubung menggunakan media sosial WhatsApp dan Instagram untuk menyalurkan informasi.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, berita Online yang membahas tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia bahkan mengenai dakwah Hizbut Tahrir Indonesia pasca keputusan pemerintah untuk mencabut badan hukum. Sedangkan objek yang dibahas adalah Aktivitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Terbentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Selain itu, peneliti juga mencari anggota Hizbut Tahrir Indonesia untuk menjadi narasumber atau informan, supaya peneliti bisa menyajikan penelitian dengan validitas terjamin.Seperti pada pembahasan sebelumnya, bahwa peneliti menggunakan narahubung dalam mengakses informasi dari anggota Hizbut Tahrir Indonesia mengenai Aktivitas Dakwah Pasca Pencabutan Badan Hukum, narasumber tersebut bernama Zafirah Quroatun "Uyun sedangkan narahubung bernama Ariza Qurota A'yun.

D. Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pentahapan berupa observasi dan dikumentasi, tahap-tahap tersebut akan dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Observasi

   Teknik ini dilaksanakan dengan membaca serta cermat artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian. Setiap aspek dari artikel maupun jurnal tersebut mulai dari Sejarah Hizbut Tahrir ke Indonesia, aktivitas Hizbut Tahrir Indonesia, Metode –strategi dakwah yang dilakukan sampai dengan proses pembelaan dalam mempertahankan badan hukum. Serta alasan dari pemerintah memutuskan adanya Perppu dalam kasus Hizbut Tahrir Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wawancara

Teknik ini menekankan pada pengumpulan dokumen-dokumen berupa *screenshot* wawancara peneliti dengan narasumber, repro isi dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, dan foto buletin dakwah Hizbut Tahrir Indonesia.

E. Analisis Data

Dalam analisis data ini peneliti melakukan usaha untuk mendapatkan hasil penelitian dengan mereduksi data, cara ini digunakan peneliti tidak lain untuk mempermudah dalam mengolah data yang ada dilapangan dengan kebenaran yang akurat. Lalu peneliti juga menggunakan tekhnik Triangulasi sebagai tekhnik untuk mengecek keabsahan data, sebelum sampai pada tahap kesimpulan.

1. Mereduksi Data

Hizbut Tahrir Indonesia diakui oleh pemerintah sebagai organisasi yang anti Pancasila.Karenanya tindakan tegas dengan mencabut badan hukumnya dilakukan pemerintah untuk menjaga keutuhan NKRI, namun perlu diketahui bahwa pemerintah tidak mebatasi atau melarang aktivitas dakwah Eks Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga adapun transformasi yang dilakukan dengan merubah nama buletin Jum'at yang dulunya Al-Islam menjadi buletin Kaffah, Web resmi Hizbut Tahrir Indonesia juga sudah tidak bisa diakses lagi. Juga terdapat buletin online milik Hizbut tahrir Indonesia yang bernama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Media Ummat, temuan ini didapatkan peneliti setelah mengobserfasi media online yang membahas tentang Hizbut Tahrir.

2. Triangulasi

Data yang diperoleh peneliti saat melakukan pengamatan tidak ada yang bertentangan dengan hasil wawancara terhadap salah satu Hizbut Tahrir. Bahwasanya pola dan metode dakwah yang digunakan masih tetap sama, diperkuat dengan hasil literatur dari NU online bahwasanya buletin Kaffah terduga menjadi transformasi dari buletin Hizbut Tahrir yang awalnya Al-Islam. dalam buletin Kaffah edisi pertama menggunakan judul Islam Kaffah, yang mana ini menjadi selogan dari Hizbut Tahrir untuk menegakkan khilafah.

Saat berdiskusi tentang penelitian yang saya angkat tentang aktivitas Dakwah Hibut Tahrir Indonesia paca keluarnya Perppu, sebagian menganggap langkah yang ditempuh pemerintah kurang tepat yang nantinya akan membuat Hizbut Tahrir semakin tercecer dan sulit dikendalikan, karena sudah bertransformasi dengan kata Hijrah yang digembor-gemborkan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data ini akan menyajikkan data yang diperoleh peneliti untuk dipertanggung jawabkan kevaliditasannya. Setelah peneliti mendapat persetujuan judul "**AKTIVITAS DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DI SURABAYA PASCA KELUARNYA PERPPU**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.“ peneliti segera menghubungi dan mencari narasumber yang pernah ikut atau masih terlibat dalam Hizbut Tahrir. Awalnya peneliti mencoba menghubungi Dr. Ainur Rofiq Al-Amin namun tidak ada tanggapan sehingga mencoba menemui beliau di Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, namun nihil.Sehingga peneliti beralih narasumber yang ada di daerah Wonocolo gg. Moden Surabaya. Dibantu dengan informan sebagai narahubung, namun belum juga mendapati hasil, narasumber pertama hingga ke tiga enggan membalas dalam percakapan chat melalui WhatsApp, sampai narasumber ke empat awalnya narasumber mau dan membatasi diri dengan enggan membahas keyakinan, dan menyarankan untuk mengikuti Ahlussunah Wal Jamaah saja. Setelah ditanya tentang kepastian untuk jadwalpertemuan beliau tidak membalas.

Peneliti juga mencari narasumber yang ada di Ponorogo, namun nihil. Karena dulu peneliti pernah bertemu dan mengikuti beberapa kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia yang ada di sana, seperti seminar motivasi dan kajian dakwah selama dua kali. Karena ketidak cocokan pemikiran mengenai keyakinan peneliti tidak melanjutkan.Ketidak cocokan ini didasari karena membahas *musyhaf Al-qur’an*.Narasumber dalam kajian mengatakan bahwa Al-Qur’an bukan berasal dari Allah SWT atau Kalamullah, tapi dari manusia.Kajian ini dilakukan peneliti saat kelas XI dan kajian bertempat di Masjid Baitul Mukhlisin.Karena nihil peneliti kembali mengorek informasi dari beberapa orang yang pernah bersangkutan dengan Hizbut tahrir

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia, entah mengenal atau melakukan wawancara dengan Hizbut Tahrir Indonesia. Akhirnya peneliti mendapatkan bantuan dari salah satu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya yang bernama Ariza Qurota A'yun untuk menjadi narahubung kepada temannya yang dahulu juga mahasiswa fakultas dakwah, peneliti menemui narahubung di Laboratorium Prodi. Bimbingan Konseling Islam. Dalam perbincangan ini peneliti disarankan menyamar dengan nama Farida, karena ditakutkan narasumber tidak leluasa dalam menyampaikan tentang aktivitas dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. Karena keterbatasan jarak dan kondisi narasumber, narahubung hanya bisa menghubungi melalui chat WhatsApp dan peneliti mempertanyakan *to the poin* untuk mendapatkan jawaban secara ringkas dan jelas. Dan didapati bahwa aktivitas dakwah tidak berubah dari dulu hingga sekarang, menyerukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar dengan metode *Laa Madiyah* (tanpa kekerasan) dan dengan *manhaj* (metode) kenabian seperti yang dicontohkan Rasulullah, menegakkan Khilafah, jadi nggak melalui parlemen atau sistem demokrasi. Kegiatan dakwah Hizbut TahrirIndonesia seperti lembaga dakwah yang lain, dengan bentuk kajian, seminar, karena dengan tujuan edukasi kepada umat. Terutama menasehati pemimpin jika memberikan kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.cara menasehatinya bisa menggunakan tulisan atau dakwah sosmed) dan juga saat ada event tertentu seperti aksi damai.

Peneliti juga mencari data melalui jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Hizbut Tahrir untuk melengkapi dan sebagai data yang valid. Peneliti juga mencari ke beberapa masjid untuk mendapatkan buletin Kaffah yang di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duga sebagai buletin Hizbut Tahrir Indonesia yang dulu bernama Al-Islam dan terah berganti, selain itu peneliti juga mencari buletin yang terkait, sehingga peneliti menemukan buletin online yang bernama Media Ummat. Situs ini masih bisa diakses dengan kata kunci Media Umat.[47]

G. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Tahap Pra Lapangan

   Dalam konteks ini peneliti terlebih dahulu membuat permsalahan yang akan dijadikan obyek penelitian, untuk kemudian membuat matrik usulan judul penelitian sebelum melaksanakan penelitian hingga membuat proposal.

2. Memilih Lapangan Penelitian

   Dalam konteks penelitian yang dilakukan peneliti sebelum membuat usulan pengajuan judul, peneliti lebih dulu mencari data atau informasi tentang obyek yang akan diteliti melalui beberapa cara, kemudian tertarik untuk dijadikan obyek penelitian yang sesuai dengan jurusan, dalm hal ini mengambil pembahasan tentang Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya. Pasca Keluarnya Peraturan Perppu Organisasi Kemasyarakatan.

47. https://mediaumat.news/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahapan ini belum sampai meningkatkan bagaimana peneliti masuk lapangan, dalam arti ini mulai mengumpulkan data yang sebenernya, pada tahap ini barulah merupakan orientasi lapangan.

4. Memilih dan Memanfaatkan Informan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan yang akan memberikan data mengenai permasalahan yang akan dibahas. Dengan demikian peneliti mencari orang yang paling mengetahui masalah mengenai Hizbut Tahrir Indonesia dan peneliti menemukan informan yang cocok dengan permasalahan yang diangkat dalam meneliti.

5. Menyiapkan Perlengkapan

Untuk kelancaran penelitian, maka peneliti menyiapkan, media komunikasi WhatsApp dan Instagram karena ketidak mungkinnya peneliti bertemu informan.

6. Etika Penelitian

Pada tahap yang terakhir ini, peneliti sangat menjaganya, sebab ini menyangkut hubungan dengan orang lain yang berkenaan dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti dan dengan terjaganya etika baik, maka nantinya bisa tercipta suatu kerjasama yang menyenangkan antara kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Tahap Pekerjaan Lapangan

1. Memahami Lapangan dan Mempersiapkan Diri

Untuk memasuki pekerjaan lapangan, peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu.Disamping itu perlu mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental dismping harus mengingat suatu persoalan etika.

2. Memasuki Lapangan

Dalam memasuki lapangan penelitian, peneliti dituntut keterlibatannya, dalam hal ini peneliti melakukan peninjauan sendiri langsung ke lokasi.

3. Berperan Serta dalam Pengumpulan Data

Peran serta peneliti.Dalam hal ini dengan mengamati secara sekilas dan secara langsung ke lokasi sambil mengumpulkan data melalui wawancara langsung. Dalam tahap pelaksanaan ini dibagi empat langkah yang dilakukan:

a. Mengumpulkan data.
b. Pengelolahan data.
c. Analisis data.
d. Penafsiran data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Analisis Data

Menurut Patton dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif yang ditulis oleh Lexi J. Moleong, bahwa analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah kita menarik garis bahwa analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data.Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikannya.Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

Disini peneliti menggunakan beberapa teknik analisis data, diantaranya :

1. Reduksi Data

   Reduksi data (*data reduction*) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan studi. Dalam penelitian ini,aspek-aspek yang direduksi adalah hasil-hasil observasi yang terkait dengan aktivitas dakwah Eks Hizbut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya, pemenuhan aspek-aspek dimaksud memudahkan dalam melakukan penyajian data dan berujung pada penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) yaitu deskripsi dalam bentuk teks naratif berdasarkan kumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Menurut Nasution[48] bahwa data yang bertumpuk dan laporan yang tebal akan sulit dipahami, oleh karena itu agar dapat melihat gambaran atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, uraian singkat, networks, charts dan grafik.

Penyajian data dalam penelitian ini tidaklah terpisah dari analisis data. Hal pertama yang dilakukan dalam proses penyajian data pada penelitian ini adalah penggambaran secara umum hasil penelitian dari lokasi penelitian yaitu dengan mewawancarai Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang ada di Surabaya.Setelah penyajian data lokasi penelitian, maka selanjutnya menyajikan atau mendeskripsikan.

J. Teknik Analisis Sintesis

1. Analisis Deduksi

48. S. Nasution, (2003) *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif.* Bandung: Tarsito. (pp. 129).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai mana diketahui bahwa aktivitas dakwah Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak hanya ada di masjid maupun mushola, namun juga merambah pada dunia pendidikan, yang dijadikan sasaran adalah mahasiswa. Dari hasil wawancara peneliti, menunjukkan bahwasanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memang sudah merambah di kampus. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara yang dilakukan Tirto.id terhadap salahsatu mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang kerap mengikuti Simposium Nasional (Simnas) Lembaga Dakwah Kampus. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) cabang IPB sebenarnya tidak begitu banyak memiliki kegitan, namun dalam setiap kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gamblang menyebarkan ideologi khilafah, dan ini juga bukan menjadi bahan pembahasan baru bagi mereka.[49]

2. Analisis Induksi

Selain membentuk kader Hzibut Tahrir Indonesia (HTI) melalui kampus, pasca pembubaran pun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih juga sama menggunakan media cetak dan online sebagai bahan dakwah untuk menyebarkan ideologi khilafah di Indonesia. Sekalipun sudah dibubarkan, bulletin Kaffah dan Media Ummat menjadi sarana mereka menyampaikan dakwahnya.bulettin Kaffah sendiri terbit ketika hari jum'at, di Surabaya sendiri peneliti menemukan bulettin Kaffah di Masjid An-Nur yang bertempat dekat dengan kampus UIN

49. https://tirto.id/cara-dakwah-hti-memikat-pengikut-dan-simpatisan-di-kampus-cs9d

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sunan Ampel Surabaya. Sehingga menunjukkan bahwasanya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak surut nyali untuk tetap berdakwah dan menyebarkan ideologi Khilafah di Indonesia meskipun Badan Hukumnya sudah dicabut oleh pemerintah.

3. Sintesis

Dengan demikian aktivitas dakwah Eks Hzibut Tahrir Indonesia (HTI) berdasarkan hasil wawancara peneliti serta observasi dari lapangan maupun di media online dan cetak, menunjukkan bahwasanya tidak ada perubahan dalam aktivitas dakwahnya dari sebelum dibubarkan maupun sesudah dibubarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya[50]

1. Rekrutmen Anggota Hizbut Tahrir Indonesiaa (HTI)

Dalam doktrin yang dilakukannya, HTI menyatakan sebagai organisasi politik yang anti demokrasi. HTI mengaku berusaha melenyapkan pancasila dan meruntuhkan NKRI, HTI mengklaim gagasan yang mereka perjuangkan adalah murni Islam, cara yang digunakan para penganut HTI adalah mereka meyakinkan umat islam bahwa khilafah islamiyah adalah satu-satunya cara untuk menyelematkan kondisi umat islam yang terbelakang dan teraniyaya.

Guna mewujudkan misi utamanya itu ada tiga tahapan yang ditempuh oleh HTI di Kecamatan Rungkut Surabaya Pertama, pembinaan dan pengkaderan, kedua interaksi dengan masyarakat untuki mensosialisasikan ide-ide, dan yang ketiga adalah mengambil alih kekuasaan. Untuk melakukan pemikirannya, HTI menunda cara-cara militer dan tidak kekerasan sampai meraih kekuasaan tetapi untuk menjalankan nmisinya mereka melakukan penyusupan sampai mereka yakin dan menang dan berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan khilafah mereka.

Adapun bagi orang awam yang ingin bergabung dengan HTI ada beberapa tahap yang harus dilalui:

50. Wawancara dengan Pak Hendik 4/Juli/2019/pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dengan mengikuti training, kemudian mengikuti rutinitas menjadi daris/darisah, mengikuti halqoh, menghatamkan sekurang-kurangnya 4 kitab : 1. Nidhomul Islam, 2. Takattul Hizbi (politik dalam HTI), 3. Mafahim HTI, 4. MMQ(Mim Muqowwimat). Dari ke-4 buku tersebut tidak hanya dipelajari saja lalu bisa menjadi anggota, namun sebagai calon anggota juga harus menerapkan semua pelajaran-pelajaran yang telah ia dapatkan dalam kehidupa sehari-harinya, setelah sekiranya ia telah menerapkan apa yang dipelajarinya di kehidupan sehari" nanti ada dewan pengesah yang akan menetapkan layak tidaknya ia untuk dinyatakan sebagai anggota dari HTI."[51]

Dalam proses menjadi anggota HTI bisa dilihat bahwasannya prosesnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan mudah, untuk menjadi anggota HTI memang dibutuhkan keyakinan yang penuh, maka dari itu para anggota HTI terlihat sangat loyalitas yang sangat kuat. Selain itu tingkat keintelektualnnya dan pengetahuan agamanya juga kuat karena telah menjalani proses pengkaderan yang sangat ketat. Kemudian berdasarkan pengamatan lapangan yang dilkakukan oleh peneliti para anggota HTI menyebarkan ajarannya dengan secara terbuka, para jamaah HTI tidak segan mengajak masyarakat awam untuk bergabung dengan cara yang sangat rapi.

2. Komunitas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)[52]

51. Wawancara dengan Pak Hendik 4/Juli/2019/pukul 10.00
52. Wawancara dengan Pak Hendik 4/Juli/2019/pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunitas Hizbu at-Tahrir didirikan bukan sekedar sebagai tempat ajang debat khalayak muda, tapi komunitasi ini merupakan wadah untuk saling mengingatkan untuk dakwah dengan tujuan mendapatkan Rahmatan Lil 'alamin. Semua pertemuan HTI ini dilakukan secara terbuka dan siapapun yang tertarik, (tanpa melihat pandangan politik dan intelektual mereka) berhak untuk berperan serta dalam mengikuti kajian-kajian HTI. Setiap peserta diberikan hak untuk berpartisipasi dalam mendiskusikan isi pertemuan, apapun sikap dan pandangan mereka terhadap Islam atau apapun materi pertemuan tersebut.

Keanggotaan Hizbut Tahrir bersifat terbuka bagi seluruh Muslim, pria maupun wanita, tanpa memandang suku bangsa, ras dan aliran pemikiran, karena partai melihat mereka semua dari sudut pandang Islam. Seseorang dapat menjadi anggota partai setelah melakukan kajian dan perenungan mendalam tentang pemikiran-pemikiran dan pendapat-pendapat partai. Keanggotaan seseorang didasarkan pada kematangan individu dalam menguasai tsaqofah partai dan mengadopsi pemikiran dan pendapat partai.

3. Metode dan Pesan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tentang Kekhalifahan dalam Masyarakat[53]

Kegiatan dakwah banyak dilakukan oleh Hizbut Tahrir dengan mendidik dan membina masyarakat melalui training pengenalan

53. Wawancara dengan Pak Hendik 4/Juli/2019/pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tsaqafah (kebudayaan) Islam, memahamkan masyarakat tentang akidah Islamiyah yang benar. Dakwah Hizbut Tahrir lebih banyak ditampakkan dalam aspek pergolakan pemikiran (*ash shira' al-fikr*). Hizbut Tahrir pula yang memperkenalkan istilah ghazw al-fikr (*perang pemikiran*) sebagai upaya meluruskan pemikiran-pemikiran yang salah serta persepsi-persepsi yang keliru, membebaskannya dari pengaruh ide-ide Barat, dan menjelaskannya sesuatu ketentuan Islam.

Metode yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam rekrutmen dan membina anggota adalah dengan mengambil thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW. Menurut pemikiran Hizbut Tahrir kondisi kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur karena mereka menerapkan hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT maka keadaan mereka serupa dengan Makkah, ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah dijadikan tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani Rasulullah SAW hingga berhasil mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah.

Dengan mencontoh pola dakwah Rasulullah, Hizbut Tahrir merumuskan tiga tahapan dakwah (*marhalah al-da'wah*) sebagai strategi beserta cirinya, yaitu:

Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (marhalah al-tatsqif), melalui halaqah-halaqah. Tahapan ini dilaksanakan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir dalam rangka pembentukan kerangka tubuh partai.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat (*marhalah tafa'ul ma'a al-ummah*). Tahapan ini dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan pengambilalihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Tahapan ini dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali Khilafah Islamiyah. Agenda yang diemban oleh Hizbut Tahrir adalah melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam daulah Islam, di mana seluruh kegiatan kehidupannya oleh aturan Islam.

Seluruh kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia adalah kegiatan yang bersifat politik. Dimana mereka memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar'i, karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat (rakyat) banyak sesuai dengan hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan-kegiatan yang bersifat politik ini tampak jelas di dalam mendidik dan membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan Islam, membebaskannya dari akidah-akidah yang rusak, pemikiran-pemikiran yang salah, serta dari persepsi yang keliru, yang sekaligus membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan -pandangan yang kufur. Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran dan dalam perjuangan politiknya.

Adapun pergolakan pemikiran tersebut dapat terlihat dalam penentangannya terhadap ide-ide dan aturan-aturan kufur. Seperti halnya dalam penentangannya terhadap ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak atau pemahaman yang keliru dengan cara menjelaskan kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, yang disertai dengan menjelaskan ketentuan hukum Islam dalam masalah tersebut. Adapun perjuangan politiknya, dapat terlihat dari penentanga nnya terhadap orang-orang kafir Imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu kekuasaannya, membebaskan umat dari tekanan dan pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan politik ini juga tampak jelas dalam menentang para penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap umat; melancarkan kritik, kontrol dan koreksi terhadap mereka serta berusaha meng gantinya apabila hak -hak umat dilangggar atau tidak menjalankan kewajibannya terhadap umat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

begitu halnya bila mereka melalaikan salah satu urusan umat, atau mereka menyalahi hukum-hukum Islam.

Jadi kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik, baik sebelummaupun sesudah mengambil alihkegiatan diluar hukum pemerintahan ataupun yang menyangkut pemerintahan. Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya pada aspek pendidikan. Hizbut Tahrir Indonesia bukan madrasah. Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan fikrah-fikrah Islam beserta hukum-hukumnya untuk dilaksanakan, dipikul dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan pemerintahan.

Hizbut Tahrir Indonesia mengemban da'wah Islam agar Islam dapat dilaksanakan dalam kehidupan, sehingga aqidah Islam menjadi dasar negara, dasar konstitusi dan Undang-undang. Karena aqidah Islam adalah aqidah aqliyah (dasar untuk pemikiran) dan aqidah siyasiyah (dasar untuk politik) yang memancarkan aturan yang dapat memecahkan 28 problem manusia secara keseluruhan, baik dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosial masyarakat dan lain-lain.

4. Kegiatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya[54]

Kegiatan yang dilakukan oleh anggota Hizbut Tharir Indonesia (HTI) tidak selalu mengacu pada hukum Islam, karena sistim

54. Wawancara dengan Pak Hendik 4/Juli/2019/pukul 10.00

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenegraan di Indonesia bukanlah Khilafah seperti yang mereka idamkan. Sehingga itu menjadikan anggota Hizbut Tahrir Indoensia lebih menghindari riba, untuk menjunjung hukum Islam di Indonesia. Maka dari itu narasumber menjelaskan bahwa beliau lebih baik menjadi montir atau membuka bengkel sendiri untuk menghindari riba apabila bekerja di perusahaan sedangkan dengan membuka bengkel narasumber bisa menjamin uang yang didapatkannya terhindar dari riba.

B. Temuan Lapangan Oleh Peneliti

1. Dakwah Hizbut Tahrir (HTI) Pasca Pembubaran.

   a. Buletin Dakwah Kaffah

   Bulettin Dakwah Kaffah merupakan buletin yang diduga menjadi buletin Hizbut Tahrir Indonesia yang mulanya bernama buletin Al-Islam.peneliti mendapatkan buletin edisi 811 pada tanggal 17 Juni 2016 di Masjid Sier Rungkut Surabaya dengan judul Menerapkan Al-Qur'an Wujud Ketakwaan. Adapun buletin Kaffah yang didapatkan di masjid yang sama, dengan judul Musubah Akhir Tahun 2018 SAATNYA BERUBAH, Agar Musibah Berbuah Berkah. Sedangkan adapun buletin Kaffah yang lain didapatkan peneliti di Masjid Muayat Jl. Pabrik Kulit Wonocolo Surabaya pada 1 Februari 2019 dengan judul Mewujudkan Indonesia Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tabloid Media Umat[55]

Tabloid Media Umat atau MU Online adalah salah satu media online yang mana menggunakan motto "Memperjuangkan Kehidupan Islam" dengan memandang semua peristiwa dari kacamata khas Islam dan memihak kaum muslimin. Media ini diduga menjadi media dakwah Hizbut Tahrir Indonesia selain dari Buletin Kaffah, dugaan ini diperkuat dengan adanya perwajahan Media Umat yang mensponsori Buletin Kaffah.

c. Shautul Media Ulama[56]

55. https://mediaumat.news/
56.https://shautululama.co/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Media Online Shautul Ulama menjadi dugaan media Hizbut Tahrir selain Bulettin Kaffah dan Tabloid Media Umat, rubrik dalam media online ini dengan terang terangan mengatasnamakan khilafah sebagai solusi tepat dalam sebuah kepemerintahan. Untuk menggaet simpatisan, Hizbut Tahrir dalam media Shautul Ulama menggunakan seruan "Ulama Aswaja" dengan melakukan kegiatan-kegiatan seminar yang diusung dalam forul Islamic Lawyers Forum (ILF).

d. Islamic Lawyers Forum (ILF)[57]

Islamic Lawyers Forum adalah semacam seminar yang membahas tentang isu-isu keislaman dengan acuan pada Khilafah. Kenyataan ini bisa dilihat dalam media shautul Ulama dan lebih banyak lagi bisa diakses dengan *search* LBH Pelita Umat. Salah satu contoh di beranda LBH Pelita Umat akan mucul judul ILF Jember: Radikalisme Adalah Konstruksi dan Framing Razim untuk Menekan Kebangkitan Islam Politik. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 28 Juli 2019, dan yang menjadi narassumber adalah Novel Bamukmin (Jubir PA 212), Ahmad Khozinudin (Ketua LBH Pelita Umat dan Kun Wazis (Pakar Komunikasi).

57.http://www.lbhpelitaumat.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. LBH Pelita Umat[58]

Lembaga badan hukum yang berpusat di Jakarta Timur ini didirikan untuk fokus mengadvokasi yang berkaitan dengan keislaman dan keumatan. Tujuan dari LBH ini sendiri tidak lain untuk membantu umat muslim dalam mengahadapi musuh-musuh Islam yang membawa ke jalur hukum. Dengan misi meraalisasikan kemajuan Islam dan visi pembebasan kepada makhluk dan menuju pada penghambaan kepada Allah SWT, komitmen yang dilakukan LBH Pelita Umat yakni membantu para Ulama, Habaib, aktivis hingga tokoh Islam dan simbol-simbol keislaman lainnya. LBH ini juga mengajak pada seluruh umat muslim dalam sinergi dakwah menuju Islam Kaffah, melalui dakwah pemikiran, dakwah tanpa kekerasan sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Struktur LBH Pelita Umat sendiri memiliki koordinasi tingakt wilayah (Korwil), Cabang di tingkat Kota atau Kabupaten. Lembaga ini menggunakan nilai-nilai islam; Al-qur'an dan As-Sunah, Ijma' shabat dan Qiyas Syar'I, serta mwngutakamkan tentang persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Dengan menjunjung selogan "Membela dan melayaniurusan umat. Lembaga hukum yang mengatasnamakan islam sebagai acuan dasar hukumnya telah tercatat dalam akta notaris di Jakarta dan mendapatkan pengesahan dari Ditjen

58.http://www.lbhpelitaumat.com/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AHU Kemenkumham RI dengan nomor AHU 0007742.AH.01.04 Tahun 2018 ditetapkan di Jakarta tanggal 05 Juni 2018.[59]

D. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1. Sejarah Hizbut Tahrir

Taqiyuddin An Nabhani merintis pembentukan Hizbut Tahrir antara tahun 1949-1953, Al-Ustadz Fauzi Sinnuqarth, menuturkan sejarah awal terbentuknya Hizbut Tahrir:

”Saya ingat, bahwa pertama kali beliau (Syaikh Taqiyuddin An Nabhani) menjelaskan masalah khilafah, ketika berada di masjid alAqsa yang penuh berkah, di salah satu sudut sebelah barat daya. Di sana terdapat ruangan yang memanjang. Beliau berbicara kepada banyak orang setelah shalat jum‟at, suatu pembicaraan yang sangat menyentuh dan jelas.Di sekeliling beliau ketika itu berkumpul ratusan orang.Beliau menceritakan kepada mereka Sirah Nabawiyyah.Sesekali beliau menceritakan wafatnya Rasulullah SAW. dan bagaimana kaum Islam setelah beliau wafat, mereka menyibukkan diri di Saqifah Bani Sa’adah untuk mengangkat seorang khalifah bagi mereka, sementara mereka membiarkan pemakaman beliau sampai bai’at kepada Abu Bakar as-Shiddiq berhasil dilakukan.[60]

Jadi, itu merupakan pembahasan dan pembicaraan pertama tentang penegakan khilafah serta seruan untuk menegakkannya.

59.https://youtu.be/4H3_oLnA04k
60. Ali Dodiman, (2012). *Memoar Pejuang Syariah dan Khilafah*. Bogor: Al Azhar Freshzone Publishing, (pp. 18).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristiwa itu terjadi tepat pada tahun 1950 M. Syaikh Taqiyuddin An Nabhani kemudian melanjutkan kontakdengan orang-orang yang menginginkan kebaikan, yaitu para pemuda dari al-Quds. Lalu dia mengontak para pemuda yang lain lagi, yang menginginkan kebaikan. Ketika dia mendengar ada seorang yang menginginkan kebaikan, atau dia merasa bahwa orang itu baik, pasti akan dia kontak. Dengan cara seperti itu, dia berhasil merekrut banyak orang.

Keanggotaan Syaikh Taqiyuddin An Nabhani di Mahkamah al-isti'naf juga memudahkan dia dalam penyelenggaraan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di palestina, diantaranya Syaikh Ahmad Ad Daur, Nimr al-Mishri, Dawud Hamdan, Syaikh Abdul Qadim Zullum dan lain-lain. Dalam kesempatan itu, dia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar, dia banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (Jam'iyat Islamiyah) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis.Dia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka.[61]

Selain itu, dia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-khutbah yang beliau sampaikan pada acara-acara keagamaan di masjid-masjid, seperti di Al masjidil Aqsha, masjid Al Ibrahim Al Khalil(Hebron), dan lain-lain. Dalam kesempatan seperti itu dia selalu menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri-negeri

61. Ibid. (pp. 21).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arab, dengan menyatakan bahwa semua itu merupakan rekayasa penjajah barat, dan merupakan salah satu sarana penjajah barat agar dapat terus mencekeram negeri-negeri Islam, dia juga sering membongkar strategi-strategi politik negara-negara barat dan membeberkan niat-niat mereka untuk menghancurkan islam dan umatnya. Selain itu beliau berpandangan bahwa kaum Islamin berkewajiban untuk mendirikan partai politik yang berasaskan Islam.

Ternyata apa yang dilakukan Taqiyuddin An Nabhani membuat Raja Abdullah bin al Hussain Murka, kemudian di panggilah Taqiyuddin An Nabhani untuk menghadap raja Abdullah, terutama karena khutbah yang pernah beliau sampaikan di Masjid Raya Nablus. Taqiyuddin An Nabhani di suruh hadir di suatu majelis lalu di Tanya oleh raja Abdullah mengenai apa yang menyebabkan beliau menyerang sistem-sistem pemerintahan di negeri negeri Arab, termasuk juga negeri Yordania. Namun Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidak menjawab pertanyaan itu dan malah berpura-pura tidak mendengar. Hal itu mangharuskan Raja Abdullah mengulangi pertanyaannya tiga kali berturut-turut. Akan tetapi Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tetap tidak menjawabnya. Maka Raja Abdullah pun naik pitam dan berkata kepada Taqiyuddin An Nabhani,"Apakah kamu akan menolong dan melindungi orang yang kami tolong dan kami lindungi dan apakah kamu juga akan memusuhi orang yang kami musuhi?" lalu Syaikh Taqiyuddin berkata kepada dirinya sendiri,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kalau aku lemah untuk menucapkan kebenaran hari ini, lalu apa yang harus aku ucapkan kepada orang-orang sesudahku nanti?"

Kemudian Syaikh Taqiyuddin An Nabhani bangkit dari duduknya seraya berkata,"Aku berjanji kepada Allah, bahwa aku akan menolong dan melindungi (agama) Allah dan akan memusuhi orang yang memusuhi (agama) Allah. Dan aku amat membenci sikap nifaq dan orang-orang munafik!"[62]

Maka marahlah raja Abdullah mendengarkan jawaban itu, sehingga dia lalu mengeluarkan perintah untuk mengusir Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dari majelis tersebut dan menangkap Taqiyuddin An Nabhani. Kemudian Syaikh Taqiyuddin An Nabhani benar-benar di tangkap, namun kemudian raja Abdullah menerima permintaan maaf dari beberapa ulama atas sikap Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tersebut lalu memerintahkan pembebasannya, sehingga Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidak sempat bermalam di tahanan. Taqiyuddin An Nabhani lalu kembali ke al-Quds dan sebagai akibat kejadian tadi, dia mengajukan pengunduran diri dari Mahkamah Al isti'naf asy-Syar'iyyah dan menyatakan, "Sesungguhnya orang-orang seperti saya sebaiknya tidak bekerja untuk melaksanakan tugas apapun dari sebuah pemerintahan."

Paska pengunduran dirinya dari Mahkamah Al"isti"naf asy-Syar'iyyah al Quds, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan.

62. Samara, I. (2002). Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani terjemahan *Muhammad Siddiq Al Jawi* Bogor: Al Azhar Press, (pp. 10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politik dan upayanya yang sungguh sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang teguh pada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An Nabhani di anggap tidak layak untuk duduk dalam majelis perwakilan.[63]

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidaklah mandeg dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Dia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya dia berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadly terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam.Dia lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut.Ternyata, pemikiran-pemikiran dia dapat diterima dan disetujui oleh para ulama tersebut.'Maka aktivitas dia pun menjadi semakin padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.

Publikasi pembentukan partai ini secara resmi tersiar tahun 1953, pada saat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani mengajukan permohonan resmi kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai Undang-Undang Organisasi yang diterapkan saat itu. Dalam surat itu terdapat permohonan izin agar Hizbut Tahrir dibolehkan melakukan

63. Ibid. (pp. 10).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aktivitas politiknya. Dalam surat itu terdapat pula struktur kepengurusan Hizbut Tahrir dengan susunan sebagai berikut:

a. Taqiyuddin An Nabhani, sebagai pemimpin Hizbut Tahrir
b. Dawud Hamdan, sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris
c. Ghanim Abduh, sebagai bendahara
d. Dr.Adil An Nablusi, sebagai anggota
e. Munir Syaqir, sebagai anggota[64]

Kemudian Hizb melengkapi syarat-syarat perundang-undangan yang dituntut oleh Undang-Undang Jam'iyah Utsmani.Hizb berpusat di AlQuds.Hizb mulai menyampaikan informasi dan pemberitahuan sesuai dengan undang-undang.Hizb menyampaikan penjelasan pendirian partainya kepada pemerintah dan melampirkan Anggaran Dasar Partai. Hizb juga menyiarkan status pendiriannya di Koran Ash-Sharîh no. 176, tanggal 14 Maret 1952 M. Dengan semua itu, Hizbut Tahrir telah menjadi partai resmi menurut undangundang terhitung sejak hari Sabtu 28 Jumada ats-Tsaniyah 1372 H, bertepatan tanggal 14 Maret 1953 M. Sejak saat itu Hizb memiliki wewenang untuk langsung melaksanakan kegiatan kepartaiannya dan berhak melaksanakan semua aktivitas kepartaian yang dinyatakan di dalam

64. Ibid. (pp. 11).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angaran dasarnya. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Jam'iyah Utsmani yang masih berlaku saat itu.[65]

Berdasarkan permohonan yang diajukan tadi, dimana pihak pemerintah di harapkan dapat memaklumi pendirian sebuah partai politik, maka Hizbut Tahrir pun lalu menyewa sebuah rumah di kota Al Quds dan memasang papan nama yang mencantumkan nama Hizbut Tahrir. Akan tetapi Departemen Dalam Negeri Yordania lantas mengirimkan sepucuk surat kepada Hizbut Tahrir yang melarangnya untuk melakukan aktivitas. Atas dasar surat itu, pihak kepolisian segera menyerbu rumah yang di sewa Hizbut Tahrir dan mencabut papan nama yang ada disana. Hizbut Tahrir lalu dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun. Sejak saat itu Hizbut Tahrir tidak dibolehkan melakukan aktivitas dan segala aktivitasnya pun dilarang.

Namun demikian, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sama sekali tidak menggubris semua itu, bahkan dia tetap bersiteguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah dia tetapkan sebagai asas-asas bagi Hizbut Tahrir. dia memang sangat menaruh harapannya untuk membangkitkan umat Islam pada Hizbut Tahrir, gerakan yang dia tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang dia gali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi SAW.

Oleh karena itu, Syaikh Taqiyuddin kemudian menjalankan aktivitas secara rahasia dan segera membentuk dewan pimpinan (Qiyadah) yang baru bagi Hizbut Tahrir, dimana dia sendiri yang

65. Mansyuro, T. (2019) Biografi Syaikh Taqiyuddin An Nabhnai Pendiri Hizbut Tahrir. Diakses dari http://harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi pucuk pimpinannya.Dibantu oleh Syaikh Abdul Qadim Zallum dan Syaikh Ahmad Ad-Daur.Dewan Pimpinan ini dikenal dengan sebutan Lajnah Qiyadah, dia terus memegang kepemimpinan Dewan pimpinan Hizb ini sampai dia wafat.[66]

2. Sejarah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Tokoh di Indonesia

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang bergerak di luar parlemen.Politik merupakan kegiatannya dan Islam adalah mabda (ideologinya).[67]Partai ini didirikan di al-Quds, Palestina pada 1953 oleh Taqiyuddin An-Nabhani dengan maksud untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam di bawah Daulah Khilafah Islamiyah.Partai politik dan gerakan dakwah ini mendasarkan perjuangannya pada thariqah dakwah Rasulullah yang tidak pernah berkompromi dengan kekufuran yang ada.[68]

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada awal dekade tahun 1980-an.[69] Namun menurut Moh Iqbal ahnaf, ide-ide Hizb telah hadir di Indonesia sejak Taqiyudin an-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.[70] Sayangnya tidak dapat dijelaskan lebih rinci daerah dan gerakan dakwah mana saja yang sempat dikunjungi oleh Amir

66. Mansyuro, T. (2019) Biografi Syaikh Taqiyuddin An Nabhnai Pendiri Hizbut Tahrir. Diakses dari http://harmoko1924.blogspot.com/2011/11/biografi-syaikh-taqiyuddin-nabhani.html
67. Ahmad Zainul Hamdi, (2017) *Wacana Dan Praktik Pluralisme Keagamaan Di Indonesia, & Muktafi*. Jakarta: Daulat Press(pp. 20-21).
68. Anonim, Mengenal Hizbut Tahrir Sebuah Partai Politik Islam Ideologis: Special Edition, (Hizbut Tahrir Indonesia), (pp. 6).
69. Majalah al-wa'ie, (2005). Majalah al-wa'ie No 55 Tahun V Edisi Khusus. (pp. 105).
70. Rahmat, I. (2005). Arus Baru Islam Radikal: *Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*. Jakarta: Erlangga, (pp. 97).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama HT ini. Sulit sekali menelusuri sejarah perjalanan HTI di era dekade 1970-an, karena mereka sendiri belum ada menulis perihal kapan ide-ide HT masuk ke Indonesia, boleh dikatakan serba misteri.Justru lebih mudah mendapatkan data-data sejarah jamaah tarbiyah (PKS) ketimbang HTI.Aktivitas HTI hanya bisa kita lacak pada tahun 1982. Hizbut Tahrir dibawa ke Indonesia oleh Abdurrahman al Baghdadi, pimpinan Hizbut Tahrir di Australia, yang pindah ke Bogor atas undangan KH Abdullah bin Nuh, kepala Pesantren Al-Ghazali. Seperti halnya Gerakan Tarbiyah, gerakan ini yang disebarkan melalui jaringan "Dakwah Kampus".[71]

Gerakan dakwah kampus muncul ketika M. Natsir mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), setelah kiprah politik eks Masyumi dikebiri dan adanya pergeseran pemikiran Nur Kholis Madjid yang kala itu dijuluki "Natsir muda". Nur Kholis Madjid seperti yang kita ketahui pernah meluncurkan gagasan kontroversial "Islam Yes; partai Islam No!".Langkah penggeseran Madjid dari pemikiran awalnya dahulu sangatlah mengecewakan kelompok yang berorientasi dakwah.Kekecewaan ini mendorong kelompok M. Natsir, Imaduddin Abdurrahim dan kawan-kawan lebih serius dalam gerakan dakwah masjid.[72]

Gerakan dakwah berawal dari Masjid Salman ITB dan menyebar ke berbagai kampus-kampus di Indonesia.Pemikiran Cak

71.Yusuf Rahmad, (2006). *Islam and Society in Contemporary Indonesia*. Jakarta: CIDA-PPs UIN Syarif Hidayatullah, (pp. 34).

72. Yudi Latif, (2005). Intelegensia Muslim dan Kuasa: *Geneakologi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan, (pp. 519-530).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur mendapat perlawanan diam-diam yang hingga saat ini wilayah kampus negeri steril dari virus-virus gerakan Liberal dan Zionisme. Gerakan Islam yang membendung gerakan liberalisme, seperti Tarbiyah, Salafi, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Tabligh tumbuh pesat di kampus-kampus nonkeagamaan, sementara di kampus-kampus Islam anehnya sejak tahun 1980-an hingga sekarang yang berkembang adalah kelompok liberal dan Marxis.[73]

Massa HTI kebanyakan dari kalangan intelektual, khususnya mahasiswa Teknik, bahasa maupun pelajar dari sekolah umum/STM. Menurut jubir HTI Ismail Yusanto, HTI cukup kuat di kampus IPB, UGM, UNAIR, ITB, UNPAD, IKIP. Kalau di Jakarta gerakan Hizbut Tahrir lebih kuat daripada UI. Sepanjang rezim Orde baru tahun 1980-an sampai 1990-an akhir, HTI masih menjalankan metode dakwah tahap pertama, seputar pengkaderan dan pembinaan secara rahasia.[74]Berapa jumlah anggota dan siapa saja yang ada dalam struktur kepengurursan organisasi juga tidak pernah dipublikasikan. Sebagian dari aktivis HTI hingga kini memakai nama samaran untuk menutupi identitasnya. Nama-nama samaran berbau ke Arabaraban, misalnya Muhammad al-Khattath, Abu fuad, Abu dzar al-Ghifari, Taqiyudin Al-Baghdadi, Salman Al-Farisi. Seperti mantan Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia; Muhammad Al-Khattath yang kini aktif sebagai Sekjen Forum Umat Islam (FUI), yang memiliki nama asli Gatot.

73. Ismail Yustanto, (2008). *Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis*, majalah Madina.

74. Fadh Ahmad Arifan, (2014). *Jurnal Studi Sosial*, Th. 6, No. 2. (pp. 94-102).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyamaran ini tidak lain karena alasan para aktivis HTI untuk merahasiakan berbagai aktivitas dakwahnya ataupun jumlah anggotanya, sebagai upaya perlindungan diri selama era Orde Baru yang menganut haluan kebijakan politik "Sapu Bersih" terhadap kelompok radikal.[75]

Aktivis HTI pernah bersatu bersama jamaah Tarbiyah dalam wadah Lembaga dakwah kampus (LDK).Tapi pada suatu ketika mereka berjalan sendiri-sendiri (pisah) karena masing-masing memiliki buku pegangan dakwah dan strategi penegakan Syariah Islam.[76]Peranan HTI di Kampus-kampus untuk saat ini di wakili Gema Pembebasan,[77] BKLDK[78] dan bentuk-bentuk organisasi mantel lainnya yang di dalamnya banyak aktivis HTI.Penulis melihat bahwa setelah Konferensi Khilafah tahun 2007, mereka mulai gencar penetrasi dakwah di pabrik, Pondok pesantren di kabupaten dan masjid-masjid di kompleks perumahan.

Adapun tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) "Presiden Besar" Hizbut Tahrir Indonesia yang pernah memiliki wewenang berhubungan langsung dengan Amir HTI: Abu Rasytah. Salah satunya Amir HT atau Atha' bin Khalil Abu Rasytah, disebut sebagai

---

75. Zaki Mubarak, (2008). *Geneakologi Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*. Jakarta: LP3ES. (pp. 243-244).
76. Lili Romly, (2006). Islam Yes Partai Islam Yes. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (pp. 237-242).
77. Ibid. hlm. 98
78. Badan Kordinasi Lembaga Dakwah Kampus atau yang disingkat BK-LDK cetuskan Sumpah Mahasiswa menegakkan Syariah dan Khilafah dan koreksi total Sumpah pemuda 1928. (18 Oktober 2009) diakses dari www.dakwahkampus.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mas'ulul 'Amm (Penanggung jawab Umum). Tokoh-tokoh yang lainnya seperti:[79]

a. Ust. Ahmad Saifullah atau Abu Fuad

Tidak banyak yang tahu tentang sosok Abu Fuad, bahkan anggota HT pun (apalagi sekedar Daris) tidak banyak tahu tentang Abu Fuad. Padahal ia adalah Muktamad paling penting di masa Orde Baru, yang menjadi dari tahun 1980-an hingga akhir 1990-an.Ia adalah mentor generasi pertama HT setelah Abdurrahman Al-Baghdadi (sekarang sudah menjadi mantan HT).

Abdurrahman Al Baghdadi, pembawa HT dari Australia ke Indonesia. Orang yang pertama kali melakukan pengkaderan HT di Indonesia tapi sekarang keluar dari Hizbur Tahrir.Abu Fuad adalah tokoh HT yang disembunyikan dari dulu hingga kini.Ia jarang menghadiri acara HT, tetapi dikabarkan mengelola penerbitan buku bernama Pustaka Thariqul Izzahyang beralamat Taman Pegelaran Jl. Gabus No. 19 Ciomas Bogor.Abu Fuad pernah menyunting buku terjemahan HT berjudul Strategi Dakwah Hizbut Tahrir.Abu FuadBagi HT di Indonesia, Abu Fuad merupakan tokoh rujukan (marja')Generasi awal HT sering bertemu dalam halaqah-halaqah yang dirintis oleh Abu Fuad.

79. Terungkap! Inilah 5 tokoh "presiden besar" hti yang siapmenyusup disetiap aksi. (23 Desember 2017). Diakses dari http://www.suaraislam.co/terungkap-inilah-5-tokoh-presiden-besar-hizbut-tahrir-indonesia-siap-menyusup-setiap-aksi/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Fuad merintis tandhim HT di indonesia pada akhir 80-an. Saat itu, ia leluasa berkeliling kampus-kampus di Bogor, Yogyakarta, Malang, Jember, Surabaya dan lainnya demi merekrut anggota dan mengisi halaqah HT.

b. Suwarno alias M. Anwar Iman

M. Anwar Iman merupakan Mudzir Maktb HT di Indonesia, yang diketahui juga sebagai Direktur Agricultural Policy Watch dan Ketua DPP HTI.Suwarno yang berasal dari Semarang dan pindah ke Bogor itu disebut-sebut memegang data-data internal penting HTI dari jaman Abu Fuad sampai tahun 2012.

c. Tun Kelana Jaya

Tun Kelana Jaya merupakan orang yang bertanggung jawab media HT internasional di Indonesia.Penerbit buku yang menjadi bagian dari jaringan internal HTI yaitu:

1) Al-Azhar Press
2) Al-Azhar Freshzone
3) Pustaka Thariqul Izzah
4) HTI Press
5) Fikrul Mustanir
6) Daarul Falah
7) Irtikaz

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Khilafah Press, dan

9) WADI Press.

d. Muhammad Al-Khaththat

Dengannama asli Gatot Saptono, menggantikan posisi Abu Fuad sebagai Muktamad. Ia menjabat sebagai Muktamad dari awal 2000 sampai pertengahan 2004.Pada tahun 2008, Gatot dikeluarkan / memilih keluar dari HT, memilih aktif di FUI (Forum Umat Islam) sebagai Sekjend.Kemudian membentuk HDI (Hizbud Dakwah Indonesia).Dari tahun 2004-2008, Gatot menjadi Penanggung Jawab Lajnah Fa'aliyah Hizbut Tahrir (lembaga yang menangani tokoh-tokoh nasional).

Setelah Gatot keluar dari HTI, Lajnah Fa'aliyah dipegang penuh oleh Ust.Rahmat Kurnia dengan tambahan wewenang yaitu diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan Amir HT yang dirahasiakan itu.Gatot dikeluarkan dari HT karena memilih tetap di FUI serta akhirnya menerima demokrasi, terbukti pada tahun 2014 mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Bulan Bintang (PBB) tapi gatot alias gagal total.Setelah Gatot keluar dari HTI, maka Muktamad digantikan oleh Muhammad Maghfur Wahid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Muhammad Maghfur Wahid alias Hafidz Abdurrahman

Ia cukup lama menjadi Muktamad HT, selama 6 tahun, 2004 – 2010.Pada tahun 2010, Lajnah Thalabun Nushrah,semacam lembaga pencari suaka mulai dibentuk HTI untuk menjalin hubungan gelap dengan militer.Hafidz Abdurahman memiliki kewenangan untuk berkomukasi langsung dengan Amir HTmeskipun hanya mengenal Abu Rasytah melalui audio suara saja.Pada tahun 2010 pula, perwakilan media resmi HT Internasional dibentuk, dipegang langsung oleh Tun Kelana Jaya.Sekarang Hafidz Abdurrahman sibuk mengurusi ma'hadnya yang berpusat di Bogor yaitu Ma'had Syaraful Haramain.Sesekali ia turun ke jalan dan ikut berorasi dalam demo-demo HT.

f. M. Rahmat Kurnia

Dikenal sebagai akademisi, menjadi dosan di Institut Pertanian Bogor (IPB).Ia sempat naik jabatan menjadi MUKTAMAD HT sementara pada tahun 2008.Ia menggantikan MUKTAMAD aktif Hafidz Abdurrahman yang kala itu menunaikan ibadah Haji.

g. Rohmat S. Labib

Menggantikan Hafidz Abdurrahman. Ia menjabat dari 2010-2012. Ia ditunjuk langsung oleh amir HTI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al Baghdadi. Pada mulanya, ketertarikan Mustofa kepada buku-buku karya Syaikh Taqiyuddin al Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Dan oleh karena itu, selama belajar di Yordania dia ikut serta dalam gerakan Hizbut Tahrir di Yordania.Dan Abdurrahman al Baghdadi pulalah yang membuka jalan bagi para aktifis Hizbut Tahrir di Indonesia kepada jaringan Hizbut Tahrir Internasional.[80]

Gerakan Hizbut Tahrir di Indonesia pada tahun 2000 secara terbukan mengumumkan keberadaannya di tengah publik.[81] Secara terbuka, munculnya organisasi ini dalam konteks Indonesia kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).[82]Namun keberadaannya hanya bisa diketahui melalui juru bicaranya, terbitan-terbitan resminya dan lain sebagainya.[83] Pada tahun 2007 Hizbut Tahrir mengadakan konferensi besar tentang penegakan khilafah di Indonesia, sekitar 100.000 orang hadir.[84]Para tokoh HTI mayoritas berlatarbelakang aktifis gerakan keagamaan di kampus-kampus.Terbukti, salah satu pimpinan pusat HTI adalah Muhammad

80. Imdadun Rahmat,(2005) *Arus Baru Islam Radikal*. (pp. 77).
81. Ibid, (pp. 126-127).
82. Umi Sumbulah, (2009). *Konfigurasi Fundamentalisme Islam.* Skripsi. Malang: UIN Malang Press (pp. 96).
83. Muhammad Fatkhurrozi. (2017). Testimoni Hizbut Tahrir oleh Ulama Malang. Diakses dari http://m.kompasiana.com/
84. Hizbut Tahrir Indonesia, *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia (Indonesia, Khilafah, dan Penyatuan Kembali Dunia Islam)*. Jakarta: HTI Press. (pp. 72).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

al Khattat alumni sivitas akademika IPB Bandung.Dan saat ini, HTI dipimpin oleh Rokhmat S Labib.[85]

Sebagai bagian dari Hizbut Tahrir, HTI juga sangat menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau kekhilafahan sebagai sarana penerapan syari'ah Islam. Syari'ah dalam pandangan Hizbut Tahrir ini harus ditopang oleh kekuatan negara.Oleh karena itu, kelompok ini mengusung ide perlunya mendirikan kembali khilafah Islamiyah atau kekhilafahan Islam. Sementara kekhilafahan dalam Islam sendiri berakhir sejak tahun 1924 dengan lenyapnya khalifah Usmaniyyah dan diganti oleh sistem republik oleh Kemmal Atatturk, sejak itu negara modern dengan batas-batas teritorialnya menjadi model yang digunakan oleh masyarakat muslim yang mendiami negara.

Meskipun mereka berstatus mayoritas mutlak seperti masyarakat muslim Indonesia. Baik Hizbut tahrir maupun HTI mengakui tidak ada teks al-Qur'an yang mewajibkan penganutnya mendirikan kekhilafahan, tetapi kewajiban itu diperoleh dalam perspektif kontekstual pesan al-Qur'an.[86]

Dalam lingkup nasional, Juru Bicara HTI tetap dipegang oleh Ismail Yusanto sedangkan Ketua Umum Nasional dipegang oleh Hafidz Abdul Rahman,[87] Ketua DPP HTI dipegang oleh Muhammad Shiddiq al-Jawi, ketua Lajnah Siyasiyah DPP HTI dipegang oleh

85. Ibid.
86. Hafidz Abdurrahman, (2005). *Hizbut Tahrir Masuk Parlemen Mengapa Tidak*? Majalah Hidayatullah, (pp. 268).
87. Turmudzi, Islam dan Radikalisme di Indonesia, (pp.267).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahya Abdurrahman dan salah satu anggotanya Budi Mulyana.[88] Sedangkan, Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dipegang oleh Iffah Ainur Rochmah dan Ketua DPP MHTI dipegang oleh Dedeh Wachidah Achmad.[89]HTI sejak awal memang didesain sebagai organisasi politik.Tetapi, berbeda dengan organisasi politik yang dikenal selama ini, HTI tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik yang ikut dalam pemilihan umum (pemilu). Dengan kata lain, HTI merupakan partai politik yang bergerak di luar parlemen.[90]

HTI merupakan partai politik meskipun tidak secara resmi mendaftarkan ke Departemen Kehakiman. HTI sebagai partai politik, memiliki tiga karakteristik yaitu pertama, secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. Kedua, ruang geraknya bersifat transnasional karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai Negara.Ketiga, aktifitas HTI bersifat ekstra parlementer.[91]

Prinsip dakwah HTI didasarkan pada pandangan-pandangan ideologis sebagai berikut: Pertama, HTI mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah. Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah adalah terwujudnya sistem khilafah dan

88. Muhammad Shiddiq al-Jawi, (2017). Demokrasi Jungkir Balikkan Norma Agama, *Media Umat* edisi 188. (pp. 9).
89. Irena Handono, (2017) Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga, *Media Umat* edisi 188. (pp. 22).
90. Jamhari dan Jajang Jahroni, (2004) *Gerakan Salafi Gerakan di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada. (pp. 180).
91. Turmudi, *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, (pp. 265-267).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi. Kedua, HTI dalam dakwahnya selalu berpedoman pada basis hukum hukum syara' sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktifitasnya. Oleh sebab itu, HTI bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang setiap hal yang bertentangan dengan Islam. Lebih lanjut HTI tidak mau berkompromi dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam. Ketiga, HTI berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum syara'.[92]

Bagi Hizbut Tahrir, pelembagaan syariat Islam dalam kehidupan Negara bahkan melekat dengan tujuannya yaitu untuk membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah".[93]

3. Doktrin Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

a. Pembebasan Islam

Persepsi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memandang kebebasan agama Islam, yakni dengan terlaksananya penyebaran dakwah terhadap umat manusia dengan tegaknya hukum-hukum Islam dan menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam di tengah kehidupannya.[94] Bagi mereka daulah Islamiyah adalah keniscayaan dan Rasulullah SAW saat dibaiat oleh kaum Muslimin pada baiat Aqabah kedua tidak lain bai'at tersebu

92. Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*. (pp. 130).
93. Haedar, Gerakan Islam Syariat, (pp. 389).
94. Daulah Islam Cet. 6. (pp. 213).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memerangi manusia baik berkulit hitam maupun kulit putih, sekalipun itu akan mengakibatkan hilangnya banyak tokoh. Sebab dalam pembai'atan tersebut juga sebagai simbol perintah mendengar dan mentaati dalam keadaan apapun bahkan siap mati untuk menyebarkan Dakwah Islam dan mereka percaya tidak ada balasan yang lain selain surga Allah STW.[95]

Pembebasan yang menjadi tujuan dakwah Islam yng dilakukan orang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) initidak lain karena rasulullah pernah mengirim surat ke luar Jazirah Arab yang ditujukan kepada para Kaisar atau penguasa negara untuk memeluk agama Islam padaTahun ke-7 H. selain itu Rasulullah juga menggunakan cara lain seperti Melancarkan perang Mu'tah dan Tabuk, menyiapkan pasukan Usamah yang juga dilakukan para Khalifah sesudah Rasulullah SAW wafat. Dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga mengacu terhadap Al-quran untuk pedoman tentang sebab-sebab perang dan keharusan jihad, seperti; QS. Al-Anfaal (08):39. QS. AL-Baqarah (02):193. QS. At-Taubah (09):29.

b. Mendirikan Daulah Islam

Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku Daulah Islamiyah Cetakan ke 6 menjelaskan bahwasanya untuk mendirikan DaulahIslamiyah tidak ada cara yang lain selain menggunakan metode Dakwah Islam dan menyatukan Umat Muslim di dunia

95. Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menggabungkan seluruh negeri Islam menjadi satu negara yang memiliki tujuan dakwah.[96]Dalam buku ini juga terdapat Rencana Undang-Undang Dasar Negara Khilafah Islam dengan total ada 191 Pasal dengan rincian BAB sebagai berikut:[97]

1) Hukum-Hukum Umum, terdapat 15 Pasal
2) Sistim Pemerintah, terdapat 8 Pasal
3) Khilafah, terdapat 18 Pasal
4) Mu'awin At-Tafwild, terdapat 7 Pasal
5) Mu'awin At-Tanfizd, terdapat 3 Pasal
6) Al-Wulad (Gubernur), terdapat 9 Pasal
7) Amirul Jihad: Direktorat Peperangan-Pasukan, terdapat 9 pasal
8) Keamanan Dalam Negeri, terdapat 3 Pasal
9) Luar Negeri, terdapat 1 Pasal
10) Direktorat Perindustrian, terdapat 1 Pasal
11) Al-qadla (Badan Peradilan), terdapat 21 Pasal
12) Jihaz Al-Idari (Aparat Administrasi) terdapat 6 Pasal
13) Baitul Mal, terdapat 1 Pasal
14) Penerangan, terdapat 2 Pasal
15) Majelis Ummat, terdapat 7 Pasal
16) Sisitim Sosial, terdapat 11 Pasal
17) Sistim Ekonomi, terdapat 47 Pasal

96. Ibid. (pp. 334).
97. Ibid. (pp. 337).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

18) Politik Pendidikan, terdapat 12 Pasal

19) Politik Luar Negeri, terdapat 11 Pasal

4. Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di SurabayaSebelum Dibubarkan

Seluruh aktifitas yang dilakukan Hizbut Tahrir bersifat politik, di mana Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan yang syar'i.Sebab politik adalah mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan pemecahan Islam.[98] Adapun beberapa aktivitas HTI di Surabaya pada tahun 2017 sebagai organisasi politik yang ingin menegakkan kembali Khilafah Islamiyah, diantaranya adalah:

a. 16 Februari 2017, HTI melaksanakan peluncuran sebuah kampanye akbar oleh devisi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia pada pukul 20.00 WIB

b. 22-27 Februari 2017, kampanye khilafah dan pendidikan dengan tema "Menghidupkan Kembali Masa Keemasan" pada tahapan yang ke-2 membahas krisis pendidikan di dunia Islam dan penyebab-penyebabnya.

c. 28 Februari-10 Maret 2017, kampanye khilafah dan pendidikan dengantema "Menghidupkan Kembali Masa Keemasan" pada tahapan yang ke-3 menyampaikan visi kebijakan pendidikan khilafah dan menyediakan pedoman

98. Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. (pp. 30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan abad 21.

d. 13 Maret 2017, konferensi perempuan Internasional dengan tema Khilafah dan Pendidikan Menghidupkan Kembali Masa Keemasan, yang dilaksanakan di berbagai kota seluruh Indonesia.

e. 25 Maret 2017, kelas politik aktivis dengan tema Mengungkap Kunci Sukses Metode Perubahan Saatnya Aktivis Mengembalikan Hak Rakyat, bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dengan narasumber Lintang Az Zahro (Lajnah Khusus Mahasiswa DPD MHTI Surabaya) di kantor sekretariat MHTI DPD I Jawa timur, Jl. Ketintang Baru Gg. 15 No. 25A Surabaya. 02 April 2017, istighosah kubro dan mengenal panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar Rayyah) di masjid Al-Akbar Surabaya.

f. 21 April 2017, HTI mengagendakan kuliah keislaman dengan tema "Teknologi Pembangunan Masa Abbasiyah" dengan narasumber Retnaning Putri, yang membahas mengenai masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan Islam dalam berbagai bidang, salah satunya adalah dibidang teknologi pembangunan.

g. 26 April 2017, diskusi yang bertema Persatuan Umat Islam dibawah Panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar Rayyah) dengan narasumber Ustadzah Kholishoh Dzikri, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahas tentang kaum Muslim merupakan kaum yang satu, yang memiliki tujuan mulia yaitu meninggikan kalimat Allah. Tidak mungkin bersatu dalam sistem yang berbeda karena kiblat kaum Muslim satu, kitab suci kaum Muslim satu, Rasul kaum Muslim satu, harusnya kaum Muslim disatukan dalam kepemimpinan yang satu dan panji yang satu yaitu panji Rasulullah (Al Liwa' dan Ar rayyah).

h. 28 April 2017, dialog nasional dengan tema Khilafah dan Wawasan Kebangsaan dengan narasumber Ustadz Fajar Kurniawan (Ketua DPD HTI Jawa Timur), Muhammad Sofi Mubarok (Kandidat Doktor UIN Jakarta dan Pengamat Politik Islam), dan Mohammad Makmun Rasyid (Penulis buku HTI, Gagal Faham Khilafah).

i. 29 April 2017, HTI mengagendakan acara bedah buku pelangi muslimah dengan narasumber Nur Eva, yang membahas tentang kedudukan seorang perempuan dalam pandangan Islam, peran perempuan menjadi sebuah pondasi kuat bangsa, dan seorang perempuan dalam meraih surga yang dijanjikannya.

j. 29 April 2017, dialog politik aktivis edisi I, bersama Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) dengan narasumber Luluk Sayyidah (DPP MHTI) di kantor

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekretariat MHTI DPD I Jawa timur, Jl. Ketintang Baru Gg. 15 No. 25A Surabaya.

k. 09 Mei 2017, konferensi pers menolak rencana pembubaran HTI, di berbagai kota di Indonesia.

l. 20 Mei 2017, diskusi publika mahasiswa khusus perempuan dengan tema ”Mengungkap Jerat Globalisasi di Balik Narasi World Class University sebuah kajian kritis bukti cinta negeri” karena mahasiswa harus terpelajar dan kritis menghadapi setiap fakta, dan kegiatan ini merupakan salah satu bukti kecintaan pada negeri untuk menjadikan identitas muslim sebagai sumber kemuliaan intelektualitas.

Disamping sejumlah aktivis diatas, sebagai partai politik ideologis, HTI terus melakukan upaya pembinaan terhadap anggotanya berupa halaqah-halaqah dengan buku-buku yang sistematis.Selain itu, HTI juga menyuarakan aspirasi masyarakat, HTI juga bergerak bersama umat dengan mengisi berbagai macam kegiatan keumatan, seperti mengisi khutbah jum’at, ceramah ramadhan, ceramah hari-hari besar Islam, kultum sebagai bagian dari pembinaan umum.Upaya rekrutmen juga dilakukan secara terus menerus melalui sejumlah dakwah dawrah dirasah dan training-training keIslaman.Semua itu merupakan bagian dari 58 aktivitas politik dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwah HTI untuk membangun kesadaran umat dalam menegakkan syari'at dan khilafah Islamiyah.[99]

E. Analisis Deduktif Induktif

Deduksi	Induksi
1. HTI tercatat berbadan hukum No AHU-00282.60.10.2014 pada Juli 2014 yang dibubarkan dengan Perpu Ormas atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 atas perubahan UU tentang Ormas yang diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017. Dan melakukan perlawanan hukum melalui PTUN dan telah inkrah pada MA. 2. Organisasi kemasyarakatan di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. Kriteria Gerakan Organisasi yangTidak Dibenarkan di NKRI	1. HTI di Surabaya melakukan rekruitmen dan dapat membentuk komunitas. 2. Dalam komunitas HTI melkasanakan kegiatan-kegiatan dakwah yang isinya menghimbau masyarakat untuk masuk Islam secara Kaffah dengan menolak pancasila dan NKRI. 3. Dari komunitas HTI ada yang sadar bahwa Hti tidak sejalan dengan kaidah Fiqh dan meleburkan diri pada Aswaja.

99. Lintang Az Zahro, Wawancara, Surabaya, 12 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertuang dalam undang-undangnya juga memberikan penjelasan tentang organisasi yang dilarang, termaktup dalam UU No. 17 Tahun 2013 Bab XVI.	

Sekalipun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara dejure pernah diakui sebagai organisasi yang sah. Namun secara defakto aktivitas HTI tidak sejalan dengan pancasila dan NKRI sebagaimana termaktup dalam UU No. 17 Tahun 2013. Metode penelitian Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mempu membentuk komunitas di Surabaya, setelah dibubarkan aktivitas dakwahnya inklut dengan Aswaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dalam judul "*Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya Pasca Terbentuknya PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*" yang dianalisis dengan kualitatif deskriptif menemukan bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Surabaya masih sama.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang pernah berdiri dan kemudian ditutup oleh pemerintah, aktivitas dakwahnya dilakukan dengan tertutup dan masyarakatnya membaur dengan Aswaja.

B. Saran

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. AktivisDakwahatauPraktisi

   Para Da'i dapat menyampaikan untuk mewaspadai bahwa Hizbut Tahrir memiliki sifat-sifat tertentu atau yang eksklusif dalam dakwahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akademisi

Para akademisi dapat melakukan penelitian sebagaimana yang saya lakukan, atau menggunakan pendekatan yang berbeda.Misalnyadalam penelitian kuantitatif seperti judul "Pengaruh Perppu Terhadap Aktivitas Da'i Eks Hizbut Tahrir Indonesia Pasca Perppu." Atau bisa juga pesan-pesan dakwah Eks Hizbut Tahrir itu dianalisis dengan semiotik, atau dapat juga kita melakukan penelitian mengenai media apa yang digunakan untuk membingkai pesan dakwah Eks Hizbut Tahrir Pasca Perppu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id